PEMERINTAH
KABUPATEN NATUNA

LAPORAN TAHUNAN 2020

BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

JL. BATU SISIR – BUKIT ARAI Gedung D Pulau Subi Kecil

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna dapat menyelesaikan Laporan Tahunan. Laporan Tahunan 2020 merupakan repleksi pelaksanaan kegiatan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka melaksanakan visi dan misi Bupati Natuna tahun 2016 - 2021.

Disamping itu, penyajian Laporan Tahunan merupakan wujud dari transparansi pengelolaan keuangan daerah serta sebagai bahan review untuk meningkatkan kinerja dan evaluasi agar pelaksanaan kegiatan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat ditingkatkan di masa yang akan datang, sehingga penyelenggaraan pelayanan publik yang mengarah pada layanan profesional dan kompeten. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan dasar dalam perbaikan perencanaan kegiatan pada tahun mendatang untuk mencapai visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Akhir kata semoga Laporan Tahun 2020 ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan bagi peningkatan dan perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Ranai, Februari 2020
Kepala,

SURYANTO, SE, MA
NIP. 197709122000121004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Sejarah Berdirinya BPKAD 1

BAB II GAMBARAN UMUM 3

A. Tujuan 3

B. Fungsi 3

C. Kewenangan 4

D. Struktur Organisasi Perangkat Daerah 4

E. Sumber Daya Manusia 16

F. Sarana dan Prasarana 19

BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN 20

A. Visi dan Misi RPJMD 2016 - 2021 20

B. Program Prioritas BPKAD Pendukung Visi Misi RPJMD 2016 - 2021 23

C. Program BPKAD Yang Tertuang Dalam RPJMD yang tertuang dalam RPJMD 2016 - 2021 yang disertai Pendanaannya 34

D. Tujuan Sasaran Program Kegiatan Prioritas 37

BAB IV HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN 40

A. Pelaksanaan Program / Kegiatan 3 Tahun Terakhir (Target dan Realisasi Tahun 2018, 2019 dan 2020) 40

B. Program/Kegiatan dan Target Kinerja Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 54

C. Hasil Capaian Program RPJMD 2016 - 2021 melalui pelaksanaan RKPD Tahun 2018, 2019 dan 2020 57

D. Hasil Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2018, 2019 dan 2020 59

E. Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Antara Pemerintah Baik Pusat, Provinsi, Kabupaten Dengan Kabupaten Lainnya..... 61
F. Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah..... 62
BAB V HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN RUTINITAS PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN TUPOKSI 63
BAB VI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN RUTINITAS PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN TUPOKSI 63
A. Kesimpulan..... 63
B. Rekomendasi 72

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Komposisi Pegawai PNS Menurut Jenis Kelamin	16
Tabel	2.2	Komposisi Pegawai Non PNS Menurut Jenis Kelamin	16
Tabel	2.3	Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang	17
Tabel	2.4	Komposisi Pegawai PNS Menurut Tingkat Pendidikan	17
Tabel	2.5	Komposisi Pegawai Non PNS Menurut Tingkat Pendidikan	18
Tabel	2.6	Komposisi Pegawai PNS Menurut Diklat Kepemimpinan Tahun 2019	18
Tabel	2.7	Jenis dan Spesifikasi Sarana dan Prasarana Tahun 2020	19
Tabel	2.8	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dengan Program Pembangunan Daerah	24
Tabel	2.9	Program Prioritas Pendukung Visi Misi RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2020 - 2021	33
Tabel	3.0	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaannya Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	35
Tabel	3.1	Program / Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah 2017 - 2021 (Sebelum Perubahan) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	38
Tabel	3.2	Program / Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah 2017 - 2021 (Setelah Perubahan) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	39
Tabel	3.3	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018	41
Tabel	3.4	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019	44
Tabel	3.5	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020	46
Tabel	3.6	Laporan Pelaksanaan Program / Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	48
Tabel	3.7	Laporan Pelaksanaan Program / Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	50

Tabel 3.8 Laporan Pelaksanaan Program / Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2020 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 52
Tabel 3.9 Laporan Pelaksanaan Program / Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2020 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 55
Tabel 4.0 Hasil Capaian Program RPJMD 2016 - 2021 Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2018, 2019 & 2020 58
Tabel 4.1 Capaian Indikator Pembangunan Daerah RPJMD 2016 - 2021 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2018, 2019 & 2020. 60
Tabel 4.2 Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat Tahun 2020 65
Tabel 4.3 Laporan Realisasi Anggaran Bidang Anggaran Tahun 2020 67
Tabel 4.4 Laporan Realisasi Anggaran Bidang Akutansi Keuangan Daerah Tahun 2020 68
Tabel 4.5 Laporan Realisasi Anggaran Bidang Aset Tahun 2020 69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi 10

BAB I
PENDAHULUAN

Sejarah Berdirinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terbentuk setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880).

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 menjadi landasan Kabupaten Natuna untuk menentapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah pada saat itu masih dalam struktur organisasi di Sekretariat Daerah yaitu Bagian Keuangan. Kemudian pada tahun 2005, dilakukan perubahan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Kemudian pada tahun 2008 Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dilakukan perubahan menjadi Organisasi Perangkat Daerah tersendiri menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. Namun pada tahun 2011 berubah lagi menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011. Setelah beberapa tahun berubah lagi menjadi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna.

BAB II
GAMBARAN UMUM

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna telah melakukan penyesuaian Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna, secara umum dapat dirinci sebagai berikut:

A. Tujuan

Dalam melaksanakan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas **"Merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan Bupati sesuai lingkup tugasnya".**

B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna, mempunyai fungsi:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan sesuai lingkup tugasnya;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan aset/barang persediaan;

3. Menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi tugas pokok selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Mengkoordinasikan program, perhitungan anggaran dan belanja daerah serta Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah dengan instansi teknis terkait;
5. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan dengan instansi terkait;
6. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan akuntansi keuangan daerah agar dapat melaksanakan pelayanan penatausahaan keuangan daerah tertib;
7. Mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian keuangan dan aset daerah dengan instansi terkait;
8. Menetapkan kebutuhan anggaran belanja langsung dan tidak langsung badan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
9. Membina dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup badan;
10. Mengkoordinasikan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kepada atasan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

C. Kewenangan

Badan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Keuangan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

D. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Susunan organisasi yang disajikan dalam gambar dibawah ini:

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi

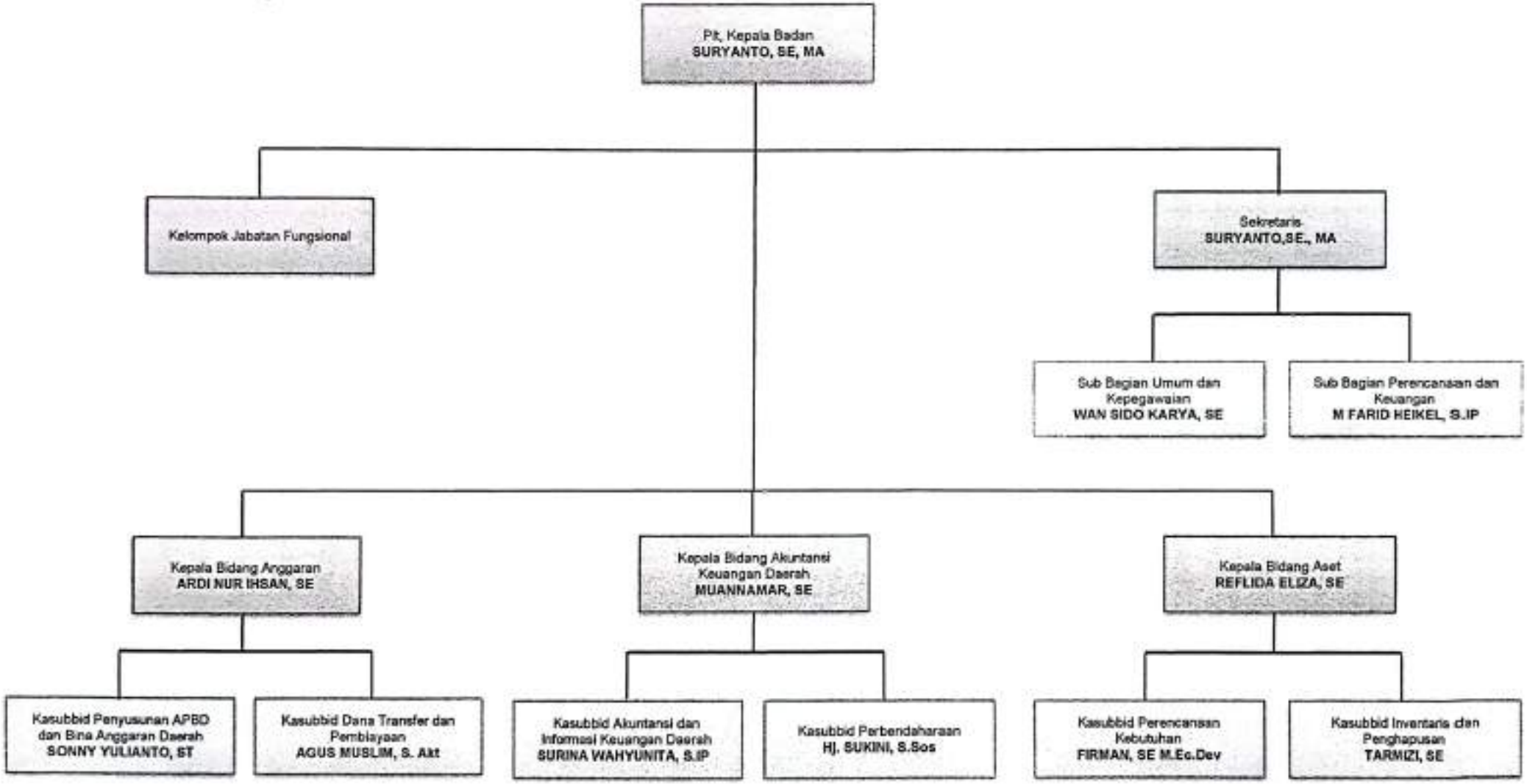

Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Bagian Sekretaris, terdiri dari:
   i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   ii. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Bidang Anggaran, terdiri dari:
   i. Sub Bidang Penyusunan APBD dan Bina Anggaran Daerah;
   ii. Sub Bidang Dana Transfer dan Pembiayaan.
4. Bidang Akuntansi Keuangan Daerah, terdiri dari:
   i. Sub Bidang Akuntansi dan informasi Keuangan Daerah;
   ii. Sub Bidang Perbendaharaan.
5. Bidang Aset, terdiri dari:
   i. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan;
   ii. Sub Bidang Inventaris dan Penghapusan.

Ikhtisar Jabatan, Tugas dan Fungsi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dijelaskan dibawah ini:

1. Badan

Kepala Badan memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan kebijakan daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah agar dapat melaksanakan pelayanan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya. Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang keuangan dan aset daerah serta melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

a. Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
   1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai perencanaan pembangunan lima tahun dan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
   2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan aset/barang persediaan;

3. Menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi tugas pokok selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Mengkoordinasikan program, perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan instansi teknis terkait;
5. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahannya dengan instansi terkait;
6. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan akuntansi keuangan daerah agar dapat melaksanakan pelayanan penatausahaan keuangan daerah tertib;
7. Mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian keuangan, pendapatan dan aset daerah dengan instansi teknis terkait;
8. Menetapkan kebutuhan anggaran belanja langsung dan tidak langsung badan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
9. Membina dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup badan;
10. Mengkoordinasikan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kepada atasan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Kepala menjalankan fungsi sebagai berikut:
   1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
   2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
   3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
   4. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
   5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai lingkup tugasnya.

2. Sekretariat

Ikhtisar Jabatan memimpin pelaksanaan tugas sekretariat dalam menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan serta membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan tugas Badan.

Tugas pokok Sekretariat adalah menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan serta mengkoordinasikan tugas Kepala Badan.

a. Sekretariat memiliki uraian tugas sebagai berikut:
   1. Menyusun rencana kerja lima tahun badan dan dilingkup sekretariat;
   2. Menyusun pengelolaan dan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi dan rumah tangga;
   3. Menyusun pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata usaha;
   4. Menyusun pelaporan badan;
   5. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, penyusunan pelaporan dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
   6. Mengkoordinasikan penyiapan data dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaporan badan;
   7. Mengevaluasikan rencana kerja sekretariat dan kinerja badan;
   8. Mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di lingkup sekretariat;
   9. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
   10. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Fungsi Sekretariat terdiri dari:

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang sekretariat;
2. Penyelenggaraan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
4. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3. Bidang Anggaran

Ikhtisar Jabatan meleksanakan perencanaan, koordinasi, penyusunan program/kegiatan, mengendalikan dan mengevaluasi inventarisasi, analisa, dokumentasi, pendataan, serta membuat laporan hasil kerja di Bidang Anggaran, berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundnag-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Tugas pokok dalm perumusan prosedur penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan, Penyusunan pedoman dan petunjuk teknsi penyusunan anggaran sesuai peraturan keuangan yang berlaku agar tertib administrasi, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar. Mengkoordinasikan perumusan program dan kebijakan teknis penyusunan anggaran dan belanja sesuai dengan prosedur yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar, penyusunan laporan BLUD, JKN, Penyertaan Modal, Dana Bergulir, Invenstasi Jangka Pendek, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Piutang.

a. Uraian Tugas Bidang Anggaran sebagai berikut:

1. Merencanakan penyiapan bahan penyusunan nota keuangan tentang APBD;
2. Merencanakan penyiapan bahan penyusunan nota keuangan tentang P-APBD;
3. Menyusun pedoman penyusunan RKA-SKPD DN RKA-PPKD;
4. Menyusun pedoman penyusunan PRKA-SKPD dan PRKA-PPKD;
5. Mengevaluasi RKA-SKPD dan RKA-PPKD untuk menyusun rancangan APBD;
6. Mengevaluasi PRKA-SKPD dan PRKA-PPKD untuk menyusun rancangan Perubahan APBD;
7. Mengevaluasi DPA-SKPD dan DPA-SKPKD;
8. Mengevaluasi DPPA-SKPD dan DPPA SKPKD;
9. Mengevaluasi pergeseran anggaran;
10. Menyusun anggaran kas pemerintah daerah untuk arus kas masuk dan arus kas keluar;
11. Merencanakan pemantauan perkembangan pelaksanaan APBD;
12. Merencanakan koordinasi penyusunan dan pengajuan RKA-SKPD dan RKA-PPKD dalam rangka penyusunan RAPBD;
13. Merencanakan penyelenggaraan koordinasi percepatan pembangunan dan penyerapan anggaran;
14. Merencanakan penyelenggaraan koordinasi program-program nasional sesuai bidang yang dilaksanakan secara bersama antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
15. Menyusun pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLUD;
16. Menyusun pengesahan realisasi pendapatan dan belanja JKN;
17. Menyusun laporan penyertaan modal;
18. Menyusun laporan dana bergulir;
19. Menyusun investasi jangka pendek;
20. Menyusun tunjangan profesi guru PNSD;

21. Menyusun tambahan penghasilan guru PNSD;
22. Menyusun piutang hasil temuan.

b. Fungsi Bidang Anggaran sebagai berikut:
1. Penyusunan dan perumusan program kerja di bidang Anggaran;
2. Pelaksanaan penyiapan dan perumusan kebijakan teknis petunjuk rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah;
3. Pelaksanaan penyusunan rencana perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
4. Menyiapkan data dana perimbangan;
5. Menyelenggarakan penyertaan modal, dana bergulir dan pinjaman daerah;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi tugas bidang anggaran;
8. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada pemimpin berdasarkan hasil kerja;
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang Aset

Ikhtisar jabatan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan barang milik daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta inventarisasi.

Tugas pokok bidang aset penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan barang milik daerah.

a. Uraian tugas bidang aset sebagai berikut:
1. Menyusun dan menyiapkan rencana operasional program dan kegiatan bidang aset;
2. Membagi tugas pada bawahan dengan cara disposisi maupun lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;

3. Menyusun dan menyiapkan rancangan pedoman peraturan yang berkenaan dengan pengelolaan barang milik daerah;
4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pemanfaatan barang milik daerah yang ada pada dinas/badan/unit kerja lainnya secara berkala melalui inventarisasi guna tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah;
5. Menghimpun, menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semester (LBPS) dan laporan barang pengguna tahunan (LBPT) dari masing-masing SKPD kepada Kepala Daerah melalui kepala Badan;
6. Menyusun standar analisis satuan harga dan menyususn standar satuan harga
7. Menyusun mekanisme penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
8. Meneliti, menelaah, memberi pertimbangan dan menindaklanjuti atas usulan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah;
9. Menghimpun, menyimpan dan mengamankan seluruh bukti asli kepemilikan barang milik daerah;
10. Memonitoring dan mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran sub bidang aset berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.

b. Fungsi bidang aset sebagai berikut:
   1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan lingkup aset;
   2. Pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang aset;
   3. Pelaksanaan pengawas dan pengendalian pemanfaatan barang milik daerah;
   4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai tugas dan fungsinya.

5. **Bidang Akuntansi Keuangan Daerah**

Ikhtisar jabatan penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prosedur akuntansi yang berlaku.

Bidang Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok Penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perbendaharaan, Penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

a. Bidang Akuntansi Keuangan Daerah memiliki uraian tugas:

1. Merencanakan dan merumuskan program kerja berkaitan dengan perbendaharaan berdasarkan kebijakan pimpinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Mengendalikan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
3. Menyusun rekapitulasi realisasi gaji PNS dilingkungan pemerintah daerah sebagai lampiran pencairan DAU setiap bulannya;
4. Memeriksa verifikasi SPM, penerbitan SP2D, penandatanganan bilyet giro SKPD, penerbitan SKPP;
5. Menyusun laporan pemungutan/pemotongan iuran PFK, iuran wajib pajak dan taperum gaji pegawai, laporan penempatan uang, laporan pengeluaran piutang dan utang daerah;
6. Menyusun surat pengesahan pendapatan dan belanja (SP2B) BLUD RSUD dan Dana Kapitasi JKN;
7. Mengadakan evaluasi dengan SKPD terkait rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran serta pemungutan/pemotongan atas SP2D;
8. Merencanakan dan merumuskan program kerja berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kebijakan pimpinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

9. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan akuntansi pengelolaan keuangan daerah;
10. Menyiapkan pelaksanaan prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
11. Mengkoordinasikan penyiapan pelaporan kas;
12. Mengkoordinasikan penyiapan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran berjalan (Laporan Keuangan Bulanan (LRA) Laporan Keuangan Triwulan (LRA) dan Laporan Keuangan Semester (LRA, LO dan Neraca);
13. Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD;
14. Mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran Sebelumnya.

b. Bidang Akuntansi Keuangan Daerah menjalankan fungsinya:
1. Pelaksanaan penyusunan dan perumusan program kerja dan kegiatan lingkup Bidang Akuntansi Keuangan Daerah;
2. Pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan akuntansi keuangan daerah;
3. Melakukan analisis pemberdayaan dalam penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah;
4. Melaksanakan verifikasi atas SPM dari SKPD dan penerbitan SP2D;
5. Pelaksanaan verifikasi dalam penerbitan SKPP;
6. Pelaksanaan verifikasi atas pemungutan/ pemotongan dan penyetoran PFK;
7. Pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah;
8. Pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran serta pemungutan/pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
9. Melaksanakan kajian dan pengembangan terhadap sistem tata usaha keuangan daerah dan penggajian;

10. Melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
11. Menyusun laporan keuangan daerah;
12. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
13. Pelaksanaan evaluasi terhadap realisasi APBD.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki kedudukan sebagai kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yang berbunyi *"Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah"*. Selanjutnya ditegaskan lagi dalam Pasal 4 ayat (4) bahwa Pejabat Perangkat Daerah terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
3. Kepala SKPD selaku PA.

Selaku SKPKD sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. Melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
4. Melaksanakan fungsi BUD; dan

5. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Sumber Daya Manusia

1. Kepegawaian

a. Komposisi Pegawai PNS dan Non PNS

Secara keseluruhan jumlah personil di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang, dengan komposisi pegawai menurut jenis kelamin, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai PNS menurut Jenis Kelamin
Tahun 2020

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	27
2	Perempuan	22
	Jumlah	49

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Non PNS menurut Jenis Kelamin
Tahun 2020

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	15
2	Perempuan	11
	Jumlah	26

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Pegawai Menurut Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Komposisi Pegawai menurut pangkat dan golongan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Komposisi pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang
Tahun 2020

No	Pangkat / Golongan Ruang	Jumlah
1	Pembina Utama Muda Tk I (IV/c)	-
	Pembina Tk. I (IV/b)	1
	Pembina (IV/a)	3
	Jumlah	4
2	Penata Tk. I (III/d)	7
	Penata (III/c)	3
	Penata Muda Tk. I (III/b)	14
	Penata Muda (III/a)	6
	Jumlah	30
3	Pengatur Tk. I (II/d)	8
	Pengatur (II/c)	5
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-
	Pengatur Muda (II/a)	-
	Jumlah	13
4	Juru Tk. I (I/d)	-
	Juru (I/c)	-
	Juru Muda (I/b)	-
	Juru Tk. I (I/a)	-
	Jumlah	-
5	Pegawai Honorer Daerah	25
	Jumlah	25
	Jumlah Keseluruhan	72

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Klasifikasi pendidikan PNS disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan
Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	2
2	Sarjana (S1)	25
3	Diploma	3

4	SLTA	17
Jumlah		**47**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sedangkan tingkat pendidikan pegawai Non PNS adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Komposisi pegawai Non PNS Daerah
menurut tingkat pendidikan
Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana (S1)	12
2	Diploma	2
3	SLTA	10
4	SLTP	1
5	SD	1
	Jumlah	25

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

d. Pegawai Mengikuti Diklat Struktural Kepemimpinan

Pegawai yang mengikuti Diklat Struktural Kepemimpinan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana ditampilkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.6
Komposisi pegawai menurut diklat kepemimpinan
Tahun 2019

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	PIM II	1
2	PIM III	1
3	PIM IV	4
	Jumlah	6

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2020

E. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah didukung oleh sarana dan prasarana dibawah ini:

Tabel 2.7
Jenis dan Spesifikasi Sarana dan Prasarana 2020

No	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang
1	Mobil	2 Unit	Baik
2	Sepeda Motor	17 Unit	Baik
3	Komputer/PC	75 Unit	Baik
4	Notebook	36 Unit	Baik
5	Laptop	17 Unit	Baik
6	Mesnin Hitung Listrik	1 Unit	Baik
7	UPS	27 Unit	Baik
8	Printer	65 Unit	Baik
9	Scanner	9 Unit	Baik
10	Server	3 Unit	Baik
11	Brankas	3 Unit	Baik
12	Alat Penghancur Kertas	14 Unit	Baik
13	AC	36 Unit	Baik
14	Proyektor/Infokus	3 Unit	Baik
15	Mesin Hitung	4 Unit	Baik
16	Mesin Fotocopy	1 Unit	Baik
17	Mesin Fingerprint	1 Unit	Baik
18	Faximile	2 Unit	Baik
19	Telepon (PABX)	1 Unit	Baik
20	GPS	8 Unit	Baik
21	Meja	93 Unit	Baik
22	Kursi	99 Unit	Baik
23	Filling Cabinet	19 Unit	Baik
24	Meja Rapat	2 Unit	Baik
25	Kursi Tunggu	8 Unit	Baik
26	Rak Buku	5 Unit	Baik
27	Almari Kayu	20 Unit	Baik
28	Sofa	2 Unit	Baik
29	Rak Besi	4 Unit	Baik
30	Kursi Rapat	136 Unit	Baik
31	Almari Alumunium Kaca	5 Unit	Baik
32	Almari Besi	9 Unit	Baik

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Visi dan Misi RPJMD 2016 - 2021

Apa itu visi dan misi (*vision and mission*)? Pengertian **visi dan misi** adalah suatu konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam waktu tertentu. Visi dan misi ini secara proses lahir dari organisasi tersebut didirikan dan menjadi pedoman dalam menjalankan organisasi. Hal tersebut harus dituangkan dalam bentuk tulisan agar semua pihak, baik internal maupun eksternal, mengetahui tujuan dari organisasi yang didirikan.

Secara umum, pengertian visi adalah pandangan jauh ke depan dari individu atau suatu organisasi, berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai, dan apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut di masa depan. Visi juga merupakan cita-cita atau tujuan suatu organisasi di masa depan yang dibuat secara tertulis, di dalam visi biasanya terdapat pandangan tentang arah suatu manajemen kemana arah perusahaan tersebut dibawa.

Sedangkan pengertian misi secara umum adalah segala sesuatu (strategi, tindakan) yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi organisasi merupakan tujuan dan alasan berdirinya sebuah organisasi dan menjadi pedoman dan arahan dalam mencapai tujuan organisasi. Pengertian misi dapat juga didefinisikan sebagai penjabaran suatu visi dimana dibuat dengan lebih lengkap sehingga dapat dipahami setiap orang yang membacanya.

Dari pengertian diatas, Pemerintah Kabupaten Natuna periode 2016 - 2021 memiliki visi yaitu "**Masyarakat Natuna Yang Cerdas dan Mandiri Dalam Kerangka Keimanan dan Budaya Tempatan**", pernyataan tersebut memiliki makna, pertama cerdas berarti masyarakat yang mampu berpikir kreatif dan inovatif bagi pengembangan dirinya, maupun pengembangan daerah. Sedangkan Mandiri memiliki makna

masyarakat yang mampu memberdayakan dan memenuhi kebutuhan dalam rangka melanjutkan kehidupannya yang lebih baik. Penjabaran Visi Kabupaten Natuna Periode 2016-2021 tersebut adalah sebagai berikut:

- Masyarakat yang **Cerdas** yang mampu berpikir kreatif dan inovatif bagi pengembangan dirinya, maupun pengembangan daerah. Menuju masyarakat Natuna cerdas ekonomi, lingkungan dan pemerintahan dapat diwujudkan dengan kesetaraan dan pendidikan yang baik, rencana strategis yang berkesinambungan dan terintegrasi serta kemitraan.
- Masyarakat yang **Mandiri** artinya mampu memberdayakan dan memenuhi kebutuhan dalam rangka melanjutkan kehidupannya yang lebih baik. Kemandirian ekonomi dan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang memungkinkan setiap masyarakat di Kabupaten Natuna untuk memenuhi beberapa kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Peningkatan kemandirian dapat diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Natuna dengan program-program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran.
- Kerangka **Keimanan** artinya bahwa kehidupan masyarakat Natuna senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai keagamaan dan budi pekerti yang luhur. Pentingnya aspek agama harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut oleh semua agama semestinya dapat ditentukan dalam interaksi sosial sehari-hari. Salah satu fokus dari aspek ini adalah terwujudnya masyarakat yang religius dan toleran dimana semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berpikir, bersikap, dan berbuat.

Kebudayaan sebagai suatu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi pedoman bagi tingkah lakunya. Masyarakat berbudaya memiliki perilaku yang dijalankan sesuai dengan moral, norma-norma yang berlaku dimasyarakat, sesuai dengan perintah di setiap agama yang diyakini, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sejalan dengan visi tersebut, selanjutnya dituangkan dalam misi dan merupakan perwujudan dan bentuk komitmen dalam mencapai visi yang dimaksud. Keberhasilan Pemerintah Daerah harus didukung oleh unit kerja dibawahnya dan harus responsif serta inovatif dalam menginterprestasikan visi dan misi kepala daerah. Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus memiliki komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna, ada 6 (enam) misi yang harus ditempuh yaitu sebagai berikut:

a. Mewujudkan Perekonomian Berbasis Sumberdaya Alam Potensial Daerah;
b. Memajukan Sektor Pendidikan melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Anak Didik;
c. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Khususnya Masyarakat Pesisir, Nelayan dan Petani;
d. Membuka Keterisoliran Daerah/desa melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dan Pembukaan Jalan;
e. Meningkatkan Keimanan dan Mewujudkan Kesadaran Budaya Melayu sebagai Payung Pembangunan Daerah;
f. **Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat.**

Sebagai bentuk dukungan dan tanggungjawab terhadap misi, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menitikberatkan pada misi yang ke-6 yaitu "**Mewujudkan Integritas Aparatur Pemerintah Sebagai Pelayan Masyarakat**". Untuk mencapai visi dari Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah diformulasikan dengan menitikberatkan pada tujuannya yaitu Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

B. Program Prioritas BPKAD Pendukung Visi Misi RPJMD 2016 - 2021

Dalam mencapai target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka strategi dijadikan sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program prioritas, guna mendapatkan "sekumpulan" program prioritas yang tidak terpisahkan di setiap strategi dan arah kebijakan. Dengan itu, dibutuhkan arah kebijakan yang memberikan optimalisasi dalam mencapai tujuan pembangunan daerah melalui program daerah. Program-program pada masing-masing arah kebijakan disebut program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaiannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah Kabupaten Natuna.

Program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program prioritas bersifat strategis mengikuti arsitektur kinerja. Dalam mengidentifikasi program-program prioritas yang bersifat strategis dilakukan dengan cara menganalisis strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan dan ditentukan, kemudian dijabarkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah yang sifatnya paling krusial. Sehingga akan terjalin keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan program yang ditetapkan. Dengan demikian maka akan terlihat alur keterkaitan antara program dengan strategi dan arah kebijakan menunjukkan pentingnya kejelasan hubungan antara program prioritas dengan sasarannya. Program pembangunan daerah Kabupaten Natuna pada perencanaan pembangunan daerah periode 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.8

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dengan Program Pembangunan Daerah

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Perangkat Daerah
Meningkatnya aktifitas ekonomi daerah	S1.Pengembangan dan penguatan potensi ekonomi daerah						
Meningkatnya kontribusi sektor pertanian,kehutanan dan perikanan		1.	Pengembangan kawasan minapolitan	1.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	Dinas Perikanan
				2.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	Dinas Perikanan
				3.	Program Penataan, Penguasaan, Penggunaan dan Penataan Tanah	Luas kawasan industri perikanan (ha)	Dinas Perikanan
		2.	Pengembangan kawasan agropolitan	4.	Program Penigkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah produksi pertanian/ perkebunan (ton)	Dinas Pertanian
				5.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Persentase kelompok peternak yang menggunakan teknologi	Dinas Pertanian
				6.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah populasi ternak (ekor)	Dinas Pertanian
				7.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Persentase kelompok petani yang menggunakani teknologi	Dinas Pertanian
Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan		3.	Peningkatan daya saing produk daerah	8.	Program Peningkatan Kerjasama Internasional	Ekspor bersih perdagangan	Dinas Perindag, Koperasi dan Usaha Mikro
				9.	Program Pengembangan Teknologi Pedesaan	Jumlah pemanfaat TTG	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata		4.	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan pariwisata	10.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah objek wisata unggulan yang dikembangkan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				11.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	- Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara - Rata-rata lamatinggal wisatawan	

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Perangkat Daerah
						nusantara	
				12.	Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah, Penataan dan Pengembangan Wilayah	Jumlah lahan yang dibebaskan (ha)	
Meningkatnya nilai investasi di sektor potensial daerah		5.	Peningkatan kualitas pelayanan investasi daerah	13.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				14.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Kenaikan /penurunan nilai realisasi PMDN (%)	
Menurunnya pencemaran air	S2. Peningkatan kualitas dan pengelolaan lingkungan hidup	6.	Peningkatan konservasi hutan dan sumber air	15.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Luas lahan konservasi	Dinas Lingkungan Hidup
				16.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah lokasi RTH	
		7.	Optimalisasi pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup	17.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Luas lahan yang direhabilitasi (ha)	Dinas Lingkungan Hidup
				18.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Volume limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan (m3/hari)	
				19.	Program Pengembangan Kinerja Pengelola Persampahan	Volume sampah yang diangkut perhari	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya IPM							
Meningkatnya kualitas pendidikan	S3. Pemerataan dan Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan	8.	Peningkatan mutu, sarana dan prasarana pelayanan pendidikan	20.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase PAUD berakreditasi minimal B	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
				21.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase SD/MI dan SMP/MTs berakreditasi minimal B	
				22.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah pelayanan data pendidikan, kepemudaan dan olah raga	
		9.	Peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik	23.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Rata-rata nilai UASBN dan UN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Perangkat Daerah
				24.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Nilai rata-rata uji kompetensi guru (UKG)	Olahraga
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	S4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	10.	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan secara merata	25.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase aksesibilitas fasilitas pelayanan kesehatan di desa	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
				26.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Sarana dan prasarana rumah sakit yang terpelihara	
		11.	Peningkatan pemenuhan kebutuhan obat masyarakat	27.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase obat yang memenuhi syarat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		12.	Peningkatan promosi kesehatan	28.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah tenaga penyuluh kesehatan yang ditingkatkan Kapasitasnya	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
						Persentase kecamatan yang mempunyai kebijakan PHBS	
						Persentase rumah tangga yang ber PHBS	
		13.	Perbaikan sistem dan akses pelayanan kesehatan masyarakat	29.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan alkes di pelayanan kesehatan dasar	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
						Persentase ketersediaan biaya rutin Puskesmas	
						Persentase kepesertaan jaminan kesehatan	
				30.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Puskesmas yang memiliki kapasitas penanganan HIV AIDS	
						Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar	
						Persentase penanggulangan penyakit menular	

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Perangkat Daerah
						Proporsi jumlah kasus tuberculosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR)	
Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja	S5. Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	14.	Peningkatan kualitas tenaga kerja sesuai potensi daerah	31.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				32.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Angka partisipasi angkatan kerja	
		15.	Pengembangan kemampuan kerja dan berusaha (wirausaha) berperspektif gender	33.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM	Jumlah wirausaha	Dinas Perindag, Koperasi dan Usaha Mikro
				34.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
				35.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan kasus anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	S6. Percepatan pengentasan Kemiskinan	16.	Perbaikan masalah kesejahteraan sosial masyarakat	36.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah PMKS yang mendapat bantuan kesejahteraan sosial (jiwa)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
				37.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	
		17.	Pengembangan dan pembangunan ekonomi masyarakat miskin	38.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
				39.	Program Penanganan Daerah Rawan Pangan	Angka rawan pangan	Dinas Ketahanan Pangan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Perangkat Daerah
	S7. Pengembangan ekonomi kerakyatan	18.	Pengembangan sentra produksi Industri pengolahan (kawasan industri)	40.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kontribusi PDRB sektor perdagangan	Dinas Perindag, Koperasi dan Usaha Mikro
				41.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kontribus PDRB Sektor Industri	
		19.	Penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	42.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah lembaga ekonomi desa yang mandiri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				43.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah pemberdayaan masyarakat perdesaan	
		20.	Pembentukan Sentra Usaha ekonomi masyarakat	44.	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Jumlah rata-rata produksi IKM	Dinas Perindag, Koperasi dan Usaha Mikro
				45.	Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	
				46.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Jumlah produk unggulan UMKM	
Meningkatnya kesejahteraan petani	S8. Pengembangan Agribisnis	21.	Optimalisasi kelembagaan pertanian	47.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai tukar petani (NTP)	Dinas Pertanian
				48.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Jumlah penyuluh bersertifikat	
Meningkatnya konektivitas kecamatan/desa	S9. Peningkatan akses ke kawasan terisolir	22.	Pembukaan dan perluasan jalan ke kawasan terisolir	49.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan baru yang dibangun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		23.	Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan	50.	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jumlah ruas jalan yang dipelihara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Perangkat Daerah
				51.	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik	
				52.	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik	
		24.	Peningkatan konektivitas antar wilayah	53.	Program Pengadaan Sarana dan Pasarana Transportasi Darat Antar Desa di Daerah Tertinggal	Persentase desa yang menerima bantuan moda angkutan barang dan angkutan penumpang	Dinas Perhubungan
				54.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang baik	Dinas Perhubungan
Meningkatnya konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah	S10. Peningkatan akses ke kawasan ekonomi	25.	Penyediaan transportasi antar pulau/desa/ kecamatan/kawasan	55.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Angkutan Darat/Laut /udara	Dinas Perhubungan
		26.	Penyediaan infrastruktur kepelabuhan seperti kapal angkutan barang dan penumpang yang memadai	56.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah orang dan barang yang diangkut	Dinas Perhubungan
				57.	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Transportasi Kepulauan Antar Desa/Pulau-pulau Kecil di Daerah Tertinggal	Persentase kecamatan yang menerima bantuan moda angkutan barang dan angkutan penumpang	
Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	S.11 Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan budaya lokal	27.	Peningkatan pelayanan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	58.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	Satpol PP, Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
				59.	Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase penegakan Perda	Satpol PP, Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Perangkat Daerah
		28.	Optimalisasi peran kelembagaan budaya dan agama dalam pembinaan masyarakat	60.	Program Pembinaan Keagamaan	Persentase pembinaan sosial budaya dan kemasyarakatan	Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)
Terwujudnya kesadaran berbudaya melayu		29.	Pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya dan karya sastra kuno	61.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah nilai budaya yang dikembangkan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				62.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah kekayaan budaya yang dikelola	
		30.	Pengembangan peran lembaga kebudayaan di setiap kecamatan	63.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Benda, situs dan kawasan cagara budaya yang dilestarikan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		31.	Peningkatan promosi, penyelenggaraan festival seni budaya	64.	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Terwujudnya pemerintahan yang bersih	S12. Reformasi Birokrasi	32.	Peningkatan pengawasan internal untuk mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	65.	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				66.	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Inspektorat
		33.	Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	67.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan PD yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas organisasi		34.	Pemanfataan teknologi informasi dalam pelayanan masyarakat dan kinerja aparatur	68.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah website perangkat daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya kualitas layanan publik		35.	Penerapan standar pelayanan (SP) sesuai dengan SPM	69.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase PD yang melaksanakan SPM	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi dan Tatalaksana)

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Perangkat Daerah
		36.	Peningkatan kapasites dan kemampuan aparatur PD	70.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase kelulusan peserta Diklat PIM III dan IV yang lulus sekali ujian	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
						Persentase kelulusan peserta diklat teknis	
						Persentase kelulusan peserta diklat fungsional	
						Persentase Widyaiswara yang memenuhi syarat kompetensi	
Meningkatnya kualitas pelaksanan perencanaan pembangunan	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	37.	Optimalisasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah	71.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				72.	Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	

Untuk merealisasikan pelaksanaan visi dan misi tersebut diatas telah diformulasi program pembangunan daerah Kabupaten Natuna pada perencanaan pembangunan daerah periode 2016-2021, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna menetapkan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah" dengan Indikator Program *(Outcame)* "Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku", untuk lebih jelas mengenai program prioritas sebagai pendukung Visi dan Misi RPJMD 2016-2021 Kabupaten Natuna dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.9
Program Prioritas Pendukung Visi Misi RPJMD
Kabupaten Natuna Tahun 2019 - 2021
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

dalam ribuan

Kode	Misi, Tujuan, Sasaran Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2016	Tahun 1 2017		Tahun 2 2018		Tahun 3 2019		Tahun 4 2020		Tahun 5 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
3.02.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan SAP	100%	100%	2.836.853	100%	2.779.482	100%	2.510.000	100%	3.910.000	100%	4.774.000	100%	16.810.335
Jumlah			**100%**	**100%**	**2.836.853**	**100%**	**2.779.482**	**100%**	**2.510.000**	**100%**	**3.910.000**	**100%**	**4.774.000**	**100%**	**16.810.335**

Sumber : RPJMD Kabupaten Natuna 2016 - 2021 Lampiran VII

C. Program BPKAD Yang Tertuang Dalam RPJMD yang tertuang dalam RPJMD 2016 - 2021 yang disertai pendanaannya

Dalam mendukung RPJMD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan beberapa program dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah;
8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah;
10. Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah;
11. Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Selanjutnya akan disajikan indikasi rencana program prioritas sebagaiman terlampir dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.0
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaannya
Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

dalam ribuan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
3.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	2,226,843	12 Bulan	1,917,200	12 Bulan	2,067,200	12 Bulan	2,067,200	12 Bulan	2,353,200	60 Bulan	10,641,443
3.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60 %	65%	349,000	65%	219,000	70%	219,000	70%	219,000	75%	219,000	75%	1,225,000
3.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai	85%	85%	75,000	90%	120,000	90%	120,000	95%	120,000	95%	120,000	95%	555,000
3.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	50%	55%	170,000	60%	170,000	65%	170,000	70%	170,000	75%	170,000	75%	850,000
3.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat / Nilai Akuntabilitas	B / 68,35	BB / 74,00	120,000	BB / 76,00	100,000	BB / 76,00	120,000	BB / 76,00	120,000	A / 80,00	120,000	A / 80,00	580,000
3.02.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Mempertahankan Fungsi Sarana dan Prasarana Aplikasi Keuanggan Daerah	2 Aplikasi	2 Aplikasi	595,360	2 Aplikasi	540,000	2 Aplikasi	640,000	2 Aplikasi	740,000	2 Aplikasi	640,000	2 Aplikasi	3,155,360
		Opini Audit PBK	WTP/ 100 %	WTP/ 100 %	1,435,000	WTP/ 100 %	1,785,113	WTP/ 100 %	690,000	WTP/ 100 %	990,000	WTP/ 100 %	690,000	WTP/ 100 %	5,590,113
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku	100%	100%	1,116,493	100%	1,014,482	100%	1,490,000	100%	2,490,000	100%	3,754,000	100%	9,864,975
3.02.32.	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah	16	16	700,000	17	600,000	17	600,000	17	600,000	18	600,000	18	3,100,000
		Jumlah Objek Pajak	548	603	2,055,280	663	1,615,000	729	2,069,595	802	2,269,595	857	2,069,595	857	10,079,065
		Persentase PAD Terhadap Penerimaan Daerah	4,40 %	4,65 %	400,000	4,92 %	400,000	4,69 %	400,000	5,05 %	400,000	5,64 %	400,000	5,64 %	2,000,000
		Persentase Peningkatan PAD	10	10	344,360	10	365,000	10	570,000	20	570,000	30	570,000	30	2,419,360
3.02.52.	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah	Tertib administrasi keuangan daerah	12 Bulan	12 Bulan	1,230,190	12 Bulan	1,450,000	12 Bulan	1,200,000	12 Bulan	1,200,000	12 Bulan	1,350,000	60 Bulan	6,430,190
3.02.53.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	Persentase aparatur keuangan yang berkompetensi	80%	80%	850,000	80%	600,000	85%	800,000	90%	800,000	100%	800,000	100%	3,850,000

3.02.56.	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah	Persentase LHP yang ditindak lanjuti	84.71	84.71	200,100	100	309,100	100	309,100	100	309,100	100	309,100	100	1,486,500
		Persentase Kinerja Keuanggan Daerah	60%	80%	250,000	80%	250,000	82%	250,000	84%	250,000	86%	250,000	86%	1,250,000
3.02.57.	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah	Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah	40%	42%	1,909,000	44%	1,400,000	46%	1,400,000	48%	1,200,000	50%	1,200,000	50%	7,109,000
		Persentase pengamanan barang milik daerah	40%	42%	200,000	44%	100,000	46%	100,000	48%	100,000	50%	150,000	50%	650,000

Sumber : RPJMD Kabupaten Natuna 2016 - 2021
Lampiran VIII

D. Tujuan Sasaran Program Kegiatan Prioritas

Tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja dan program dan kegiatan prioritas tertuang di dalam Renstra. Tujuan merupakan penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi.

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Berikut disajikan Matrik Renstra Perangkat Daerah sebelum dan sesudah perubahan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Program / Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah 2017 - 2021 (Sebelum Perubahan)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Terwujudnya penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	3.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	2,236,64	12 Bulan	1,917,20	12 Bulan	2,067,20	12 Bulan	2,067,20	12 Bulan	2,353,20	60 Bulan	10,641,44	BPKAD
			3.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60 %	65%	349,00	65%	219,00	70%	219,00	70%	219,00	75%	219,00	75%	1,225,00	BPKAD
			3.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai	85%	85%	75,00	90%	120,00	90%	120,00	95%	120,00	95%	120,00	95%	555,00	BPKAD
			3.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	55%	55%	170,00	60%	170,00	65%	170,00	70%	170,00	75%	170,00	75%	850,00	BPKAD
			3.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat / Nilai Akuntabilitas	B / 68,35	BB / 74,00	120,000	BB / 75,00	100,000	BB / 76,00	120,000	BB / 76,00	120,000	A / 80,00	110,000	A / 80,00	580,000	BPKAD
			3.02.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Mempertahankan Fungsi Sarana dan Prasarana Aplikasi Keuanggan Daerah	2 Aplikasi	2 Aplikasi	590,360	2 Aplikasi	540,000	2 Aplikasi	640,000	2 Aplikasi	740,000	2 Aplikasi	640,000	2 Aplikasi	3,155,360	BPKAD
					Opini Audit BPK	WTP/ 100 %	WTP/ 100 %	1,430,000	WTP/ 100 %	1,785,113	WTP/ 100 %	690,000	WTP/ 100 %	590,000	WTP/ 100 %	690,000	WTP/ 100 %	5,590,113	BPKAD
					Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku	100%	100%	1,116,493	100%	1,014,482	100%	1,490,000	100%	2,490,000	100%	3,754,000	100%	9,864,975	BPKAD
			3.02.30.	*Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*	*Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah*	*16*	*16*	*700,000*	*17*	*600,000*	*17*	*600,000*	*17*	*600,000*	*18*	*600,000*	*18*	*3,100,000*	*BPPRD*
					Jumlah Obyek Pajak	*318*	*603*	*2,051,29*	*662*	*1,615,000*	*720*	*2,069,555*	*802*	*2,260,555*	*857*	*2,069,555*	*857*	*10,079,085*	*BPPRD*
					Persentase PAD Terhadap Penerimaan Daerah	*4,47 %*	*4,65 %*	*400,000*	*4,82 %*	*400,000*	*4,69 %*	*400,000*	*5,05 %*	*400,000*	*5,64 %*	*400,000*	*5,64 %*	*2,000,000*	*BPPRD*
					Persentase Peningkatan PAD	*10*	*10*	*344,360*	*10*	*365,000*	*10*	*570,000*	*20*	*570,000*	*30*	*570,000*	*30*	*2,419,360*	*BPPRD*
			3.02.52.	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah	Tertib administrasi keuangan daerah	12 Bulan	12 Bulan	1,230,190	12 Bulan	1,450,000	12 Bulan	1,200,000	12 Bulan	1,200,000	12 Bulan	1,350,000	60 Bulan	6,430,190	BPKAD
			3.02.53.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola	Persentase aparatur keuangan yang berkompetensi	80%	80%	850,000	80%	600,000	85%	800,000	90%	800,000	100%	800,000	100%	3,850,000	BPKAD
			3.02.56.	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah	Persentase LHP yang ditindak lanjuti	84.71	84.71	200,100	100	309,100	100	309,100	100	309,100	100	309,100	100	1,436,500	BPKAD
					Persentase Kinerja Keuanggan Daerah	60%	80%	250,000	80%	250,000	82%	250,000	84%	250,000	86%	250,000	86%	1,250,000	BPKAD
			3.02.57.	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah	Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah	40%	42%	1,909,000	44%	1,400,000	46%	1,400,000	48%	1,200,000	50%	1,200,000	50%	7,109,000	BPKAD
					Persentase pengamanan barang milik daerah	40%	42%	200,000	44%	100,000	46%	100,000	48%	100,000	50%	150,000	50%	650,000	BPKAD

Sumber : Renstra BPKAD 2016 - 2021

Tabel 3.2
Program / Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah 2017 - 2021 (Setelah Perubahan)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program Sesuai Tupoksi dan Program Prioritas Pemkab/Kota	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (Baseline) (Tahun 2016)	Target Kinerja Program (Setelah Perubahan)															Unit Kerja Perangkat Daerah
							Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
Terwujudnya penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	3.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	1,236,943	12 Bulan	1,807,300	12 Bulan	2,057,200	12 Bulan	2,867,200	12 Bulan	2,202,200	60 Bulan	10,641,443	BPKAD		
			3.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60 %	65%	369,000	65%	219,000	70%	210,000	70%	219,000	75%	219,000	75%	1,225,000	BPKAD		
			3.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai	85%	85%	75,000	90%	120,000	90%	120,000	95%	120,000	95%	120,000	95%	555,000	BPKAD		
			3.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Berserti fikasi	50%	50%	170,000	60%	170,000	65%	170,000	70%	170,000	70%	170,000	70%	850,000	BPKAD		
			3.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai akuntabilitas	B / 66,25	BB / 74,00	110,000	BB / 76,00	100,000	BB / 76,00	100,000	BB / 76,00	120,000	A / 80,00	120,000	A / 80,00	560,000	BPKAD		
			3.02.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Mengembangkan Fungsi Sarana dan Prasarana Aplikasi Keuangan Daerah	1 Aplikasi	1 Aplikasi	595,260	1 Aplikasi	540,000	2 Aplikasi	640,000	2 Aplikasi	740,000	2 Aplikasi	840,000	2 Aplikasi	3,315,260	BPKAD		
					Opini Audit BPK	WTP/ 100 %	WTP/ 100 %	1,415,000	WTP/ 100 %	1,795,313	WTP/ 100 %	900,000	WTP/ 100 %	900,000	WTP/ 100 %	900,000	WTP/ 100 %	6,910,313	BPKAD		
					Penyelesaian laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku	100%	100%	1,116,443	100%	1,014,481	100%	1,490,000	100%	2,490,000	100%	3,794,000	100%	8,604,975	BPKAD		
			3.02.22.	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah	22	22	795,000	22	600,000									BPPRD		
					Jumlah Objek Pajak	947	947	2,955,000	947	2,655,000									BPPRD		
					Persentase PAD Terhadap Penerimaan Daerah	4,42 %	4,65 %	400,000	4,67 %	400,000									BPPRD		
					Persentase Peningkatan PAD	20	20	394,360	20	360,000									BPPRD		
			3.02.32.	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah	Tertib administrasi keuangan daerah	12 Bulan	12 Bulan	1,230,190	12 Bulan	1,450,000	12 Bulan	1,200,000	12 Bulan	1,200,000	12 Bulan	1,350,000	60 Bulan	6,430,190	BPKAD		
			3.02.33.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	Persentase aparatur keuangan yang terbimbingkan	80%	80%	810,000	80%	800,000	80%	800,000	80%	800,000	100%	800,000	100%	3,810,000	BPKAD		
			3.02.36.	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah	Persentase LKP yang dibahas tepat	94,71	94,71	200,000	100	300,100	100	300,100	100,0	300,100	100	300,100	100	1,436,500	BPKAD		
					Persentase Kinerja Keuangan Daerah	80%	80%	250,000	80%	250,000	82%	250,000	84%	250,000	86%	250,000	86%	1,250,000	BPKAD		
			3.02.37.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Kebenaran Inventaris Aset Barang Milik Daerah	40%	42%	1,900,000	44%	1,400,000	46%	1,400,000	48%	1,200,000	50%	1,200,000	50%	7,100,000	BPKAD		
					Persentase pengamanan barang milik daerah	40%	42%	200,000	44%	100,000	46%	100,000	48%	100,000	50%	150,000	50%	650,000	BPKAD		

Sumber : Renstra BPKAD 2016 - 2021

BAB IV

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

A. Pelaksanaan Program / Kegiatan 3 Tahun Terakhir (Target dan Realisasi Tahun 2018, 2019 dan 2020)

Sistem perencanaan dan penganggaran secara regulasi telah mengalami beberapa kali perubahan dalam penerapannya. Dari mulai menggunakan pendekatan tradisional hingga menjadi penganggaran berbasis kinerja (PBK). Perubahan ini ditandai dengan lahirnya beberapa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja terus melakukan perbaikan salah satunya melalui penataan arsitektur dan informasi kinerja. Penataan yang dilakukan tersebut bertujuan memperkuat pondasi sistem penganggaran berbasis kinerja. Sudah seharusnya proses perencanaan anggaran dengan cara melakukan *benchmarking* terkait penerapan reformasi pengelolaan keuangan publik untuk mendapatkan *best practices* yang taat terhadap peraturan perundang-undangan. Harmonisasi antara *satkeholder* diharapkan dapat menciptakan perencanaan dan penganggaran yang berkualitas. Sejalan dengan itu, evaluasi kinerja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai visi dan misi menjadi faktor utama yang bukan hanya diukur dari sisi penyerapan anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilhat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018

No	U R	Input/ Output/ Outcome	Satuan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
01.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**2,574,485,488.00**	**2,543,543,193.00**	**98.72**
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Input	Rupiah	40,000,000.00	39,975,000.00	99.94
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input	Rupiah	93,900,000.00	85,776,013.00	91.35
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.06.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input	Rupiah	100,000,000.00	99,540,000.00	99.54
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Input	Rupiah	120,000,000.00	119,998,000.00	100.00
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input	Rupiah	185,000,000.00	184,995,000.00	100.00
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.13.	Penyediaan perabotan dan perlengkapan kantor	Input	Rupiah	238,100,000.00	220,721,500.00	92.38
		Output	Unit	40	40	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input	Rupiah	32,200,000.00	27,105,000.00	84.18
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Input	Rupiah	149,000,000.00	147,436,000.00	98.95
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Input	Rupiah	600,100,000.00	600,097,517.00	100.00
		Output	Kali	34	34	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Input	Rupiah	303,847,400.00	303,811,752.00	100.00
		Output	Orang	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Input	Rupiah	285,130,000.00	284,873,000.00	99.91
		Output	Kali	18	18	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
02.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**278,900,000.00**	**268,323,605.00**	**99.05**
02.04.	Penyediaan gedung/gudang kantor	Input	Rupiah	32,500,000.00	32,500,000.00	100.00
		Output	Gedung	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Input	Rupiah	133,000,000.00	130,481,605.00	98.11
		Output	Unit	22	22	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Input	Rupiah	85,400,000.00	85,331,000.00	99.92
		Output	Unit	38	38	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
03.	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**75,000,000.00**	**74,967,577.00**	**99.96**
03.04.	Kursus dan peningkatan ketampilan aparatur	Input	Rupiah	75,000,000.00	74,967,577.00	99.96
		Output	Orang	15	15	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
06.	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**			**157,376,000.00**	**156,441,543.00**	**99.41**
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Input	Rupiah	157,376,000.00	156,441,543.00	99.41
		Output	Laporan	3	3	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.	**Program Penataan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**			**5,438,397,453.00**	**5,018,777,370.00**	**92.29**
17.06.	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Input	Rupiah	1,434,993,000.00	1,323,318,561.00	92.24
		Output	Perda	1	1	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
17.07.	Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Input	Rupiah	1,146,378,453.00	1,107,445,458.00	96.60
		Output	Perda	1	1	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
17.18.	Pengintegrasian dan Pendaftaran Sistem Komputasional Pelaporan Akuntansi Pemerintah	Input	Rupiah	258,383,000.00	184,290,255.00	71.38
		Output	Aplikasi	1	1	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11

No	URAIAN	Input/ Output/ Outcome	Satuan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
17.11.	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputasi pemasukan keuangan	Input	Rupiah	298,918,000.00	282,283,594.00	94.44
		Output	Aplikasi	1	1	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
17.18	Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Input	Rupiah	480,258,000.00	424,795,881.00	88.45
		Output	Laporan	3	3	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.27.	Validasi data laporan keuangan daerah	Input	Rupiah	1,483,679,000.00	1,430,361,167.00	96.41
		Output	Kegiatan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
17.36.	Penyusunan pokok-pokok pengelolaan barang daerah	Input	Rupiah	83,120,000.00	77,360,997.00	93.31
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
17.75	Rekonsiliasi data pajak	Input	Rupiah	253,800,000.00	189,823,514.00	75.03
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	85.00	108.00	185.26
32.	**Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**			**1,440,869,000.00**	**1,341,879,003.00**	**93.13**
32.02	Pendataan objek pajak	Input	Rupiah	87,344,000.00	77,294,000.00	88.49
		Output	Objek	300	300	100.00
		Outcome	Persen	85.00	100.00	185.30
32.03.	Penagihan wajib pajak	Input	Rupiah	72,802,000.00	65,102,184.00	89.43
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
32.04.	Pemutakhiran data PBB	Input	Rupiah	47,383,000.00	45,799,000.00	96.66
		Output	Kali	4	4	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
32.06.	Rekonsiliasi retribusi	Input	Rupiah	47,800,000.00	45,876,800.00	95.89
		Output	Kali	3	3	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
32.09.	Analisa zona nilai tanah	Input	Rupiah	171,980,000.00	160,172,600.00	93.13
		Output	Kecamatan	7	7	100.00
		Outcome	Persen	95.00	100.00	105.26
32.12.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sistim-sistim Penilaian Daerah	Input	Rupiah	335,123,000.00	325,031,209.00	96.97
		Output	Kali	9	9	100.00
		Outcome	Persen	85.00	100.00	105.26
32.13	Penetapan Objek Pajak PBB-P2 dan BPHTB	Input	Rupiah	363,382,000.00	309,648,400.00	85.44
		Output	SPPT PBB	40,000	40,000	100.00
		Outcome	Persen	95.00	100.00	105.26
32.14.	Penagihan Pajak PBB-P2	Input	Rupiah	118,915,000.00	102,894,750.00	86.57
		Output	Kali	4	4	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
52.	**Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah**			**2,396,835,000.00**	**2,354,206,365.00**	**98.22**
52.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Penggajian	Input	Rupiah	256,450,000.00	231,578,493.00	90.30
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
52.03.	Penyusunan Surat Pengelolaan Data (SPD), Anggaran Kas dan SPTD	Input	Rupiah	112,700,000.00	111,992,000.00	99.37
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
52.06.	Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Keuangan	Input	Rupiah	783,635,000.00	780,991,772.00	99.41
		Output	Kali	4	4	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
52.04.	Peningkatan pengelolaan perbendaharaan keuangan daerah	Input	Rupiah	1,241,050,000.00	1,229,644,000.00	99.00
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
56.	**Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah**			**991,366,000.00**	**678,111,216.00**	**75.23**
56.02.	Penyusunan laporan keuangan semester I dan laporan realisasi anggaran triwulan	Input	Rupiah	387,860,000.00	277,091,147.00	71.44
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	82.00	82.00	100.00
56.03.	Peningkatan laporan dan kinerja keuangan daerah	Input	Rupiah	513,506,000.00	401,020,069.00	78.09
		Output	SKPD	45	45	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
57.	**Program Pendaftaran dan Pengembangan Pemanfaatan Aset Daerah**			**1,118,569,000.00**	**1,007,030,205.00**	**90.02**
57.02	Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Input	Rupiah	108,860,000.00	99,020,000.00	90.96

No	URAIAN	Input/ Output/ Outcome	Satuan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
57.03.	Penghapusan dan pemindahtangan barang milik daerah	Input	Rupiah	191,813,000.00	138,895,600.00	72.41
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
57.04.	Pengamanan dan monitoring barang milik daerah	Input	Rupiah	174,786,000.00	173,649,600.00	99.40
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
57.05.	Verifikasi dan Rekonsiliasi Data Aset	Input	Rupiah	178,390,000.00	161,300,250.00	94.78
		Output	Kali	1	1	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
57.08.	Appraisal Aset / Barang Daerah	Input	Rupiah	362,390,000.00	321,218,105.00	88.64
		Output	Kegiatan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	65.00	65.00	100.00
57.09.	Penyusunan laporan materi barang milik daerah	Input	Rupiah	119,418,800.00	112,944,700.00	94.59
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
				14,375,708,741.00	13,443,279,985.00	93.50

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2018

Berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2018 pada tabel diatas, penyerapan anggaran program dan kegiatan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp13.443.279.985,00 atau 94,00% dari yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 14,375,708,741, target *output* dan *outcome* sesuai dengan yang direncanakan. Sisa anggaran sebesar 6,00% merupakan penghematan dari anggaran dan secara target kinerja telah terpenuhi.

Sedangkan realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 14,654,719,063.00 atau sebesar 92,76% dari pagu anggaran yaitu sebesar Rp. 15,798,996,040.00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya penyerapan anggaran lebih besar namun dari sisi alokasi turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun hal ini tidak menjadi kinerja dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menjadi tidak optimal, justru secara *output* dan *outcome* semua sudah terpenuhi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

No	URAIAN	Input/ Output/ Outcome	Satuan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
01.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**3,014,606,040.00**	**2,787,018,700.00**	**92.48**
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat					
		Input	Rupiah	45,000,000.00	45,000,000.00	100.00
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					
		Input	Rupiah	318,150,000.00	138,867,500.00	92.73
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.09.	Penyediaan jasa kebersihan kantor					
		Input	Rupiah	119,000,000.00	108,340,000.00	98.68
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor					
		Input	Rupiah	150,000,000.00	149,916,000.00	99.94
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					
		Input	Rupiah	267,550,000.00	267,303,500.00	99.93
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.13.	Penyediaan perabotan dan perlengkapan kantor					
		Input	Rupiah	340,800,000.00	330,183,500.00	96.84
		Output	Unit	40	40	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					
		Input	Rupiah	63,600,000.00	30,134,000.00	48.24
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman					
		Input	Rupiah	125,800,000.00	119,648,000.00	95.11
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kerja daerah					
		Input	Rupiah	600,100,000.00	596,138,000.00	99.34
		Output	Kali	36	40	111.65
		Outcome	Persen	100.00	111.65	111.65
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran					
		Input	Rupiah	708,816,640.00	687,918,160.00	97.14
		Output	Orang	36	36	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.10.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah					
		Input	Rupiah	186,238,800.00	183,193,100.00	98.24
		Output	Kali	40	35	87.50
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
02.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**230,500,000.00**	**218,832,900.00**	**94.94**
02.16.	Penyediaan gedung/gedung kantor					
		Input	Rupiah	52,500,000.00	52,500,000.00	100.00
		Output	Gedung	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			192,800,000.00	191,586,900.00	99.35
		Output	Unit	22	22	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			85,200,000.00	84,830,000.00	99.57
		Output	Unit	52	52	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
05.	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**135,000,000.00**	**92,448,540.00**	**68.50**
05.04.	Kursus dan penyegaran keterampilan aparatur					
		Input	Rupiah	135,000,000.00	92,448,540.00	68.50
		Output	Orang	15	15	100.00
		Outcome	Persen	65.00	65.00	100.00
06.	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan**			**104,616,000.00**	**94,871,117.00**	**90.69**
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					
		Input	Rupiah	104,616,000.00	94,871,117.00	90.69
		Output	Laporan	5	5	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**			**7,541,017,000.00**	**7,099,734,106.00**	**93.99**
17.01.	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah					
		Input	Rupiah	1,379,850,000.00	1,333,360,071.00	97.36
		Output	Perda	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.03.	Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah					
		Input	Rupiah	1,357,900,000.00	1,326,840,017.00	97.69
		Output	Perda	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.10.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Komputerisasi Pelaporan Akuntansi Pemerintah					
		Input	Rupiah	519,630,000.00	484,457,257.00	93.23
		Output	Aplikasi	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.11.	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi pentatausahaan keuangan					
		Input	Rupiah	689,470,000.00	630,785,739.00	91.48
		Output	Aplikasi	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.18.	Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD					
		Input	Rupiah	372,450,000.00	336,218,122.00	90.19
		Output	Laporan	5	5	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.27.	Validasi data laporan keuangan daerah					
		Input	Rupiah	865,982,000.00	831,342,033.00	96.01
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.35.	Rekonsiliasi data pajak					
		Input	Rupiah	574,512,000.00	487,108,644.00	84.85
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.52.	Pengelolaan sistem informasi keuangan daerah					
		Input	Rupiah	1,816,593,000.00	1,687,540,741.00	91.65
		Output	Aplikasi	5	5	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
52.	**Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah**			**1,033,793,000.00**	**1,024,096,585.00**	**99.48**
52.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Pengujian					
		Input	Rupiah	218,250,000.00	271,479,818.00	87.57
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
52.02.	Penyusunan Surat Perintah Data (SPD), Anggaran Kas dan SPTD					
		Input	Rupiah	304,500,000.00	302,211,000.00	99.93
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
52.04.	Koreksi dan Rekonsiliasi Data Keuangan			800,000,000.00	800,000,000.00	99.80
		Input	Rupiah	4	4	100.00
		Output	Kali	90.00	100.00	111.11
		Outcome	Persen			

No	URAIAN	Input/ Output/ Outcome	Satuan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
53.	**Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah**			**82,450,000.00**	**74,162,784.00**	**89.95**
53.03	Perhitungan tahun pengelolaan barang daerah	Input	Rupiah	82,450,000.00	74,162,784.00	89.95
		Output	Orang	80	80	100.00
		Outcome	Persen	85.00	85.00	100.00
56.	**Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah**			**816,606,000.00**	**660,434,373.00**	**80.88**
56.02	Penyusunan laporan keuangan semester I dan laporan realisasi anggaran triwulan	Input	Rupiah	321,860,000.00	220,880,246.00	68.63
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Bulan	100.00	100.00	100.00
56.03	Peningkatan laporan dan kinerja keuangan daerah			494,746,000.00	439,554,127.00	88.84
		Output	BKPD	45	45	100.00
		Outcome	Persen	80.00	80.00	100.00
57.	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pemanfaatan Aset Daerah**			**2,221,419,000.00**	**1,991,475,838.00**	**89.65**
57.02	Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Input	Rupiah	166,878,000.00	147,204,000.00	88.64
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	46.00	46.00	100.00
57.03	Penghapusan dan pemindahtangan barang milik daerah	Input	Rupiah	279,242,000.00	218,098,352.00	78.05
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	46.00	46.00	100.00
57.04	Pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah	Input	Rupiah	312,992,000.00	267,730,365.00	85.54
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	46.00	50.00	108.70
57.05	Verifikasi dan Rekonsiliasi Data Aset Kabupaten Natuna	Input	Rupiah	653,187,000.00	602,992,759.00	92.32
		Output	Kali	1	1	100.00
		Outcome	Persen	46.00	46.00	100.00
57.06	Penyusunan Daftar Kendaraan Milik Pemerintah Daerah	Input	Rupiah	211,216,000.00	197,396,000.00	93.46
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	46.00	50.00	108.70
57.08	Appraisal Aset / Barang Daerah	Input	Rupiah	336,327,000.00	326,978,404.00	97.22
		Output	Keyasan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	46.00	50.00	108.70
57.09	Penyusunan laporan mutasi barang milik daerah	Input	Rupiah	265,287,000.00	231,085,598.00	87.07
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	46.00	46.00	100.00
				15,798,996,000.00	14,654,719,063.00	92.76

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2019

Besaran anggaran dan maksimalnya penyerapan anggaran tidak menjamin kinerja dari suatu organisasi dapat dicapai dengan baik. Untuk itu perlu pemahaman yang baik tentang anggaran itu sendiri. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan menyatakan berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) serta berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah kebijakan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan berbagai pertimbangan agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi mudah dilakukan. Penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp12.859.426.739,00 atau sebesar 91,19% dari alokasi yang dianggarkan yaitu sebesar Rp14.102.106.598,00. Untuk lebih jelas realisasi program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020

No	URAIAN	Input/ Output/ Outcome	Satuan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
01.	**Program pelayanan Administrasi Perkantoran**			**2,734,917,015.00**	**2,709,800,126.00**	**99.09%**
01.01	Penyediaan jasa surat menyurat					
		Input	Rupiah	23,000,000.00	22,990,000.00	99.96%
		Output	Bulan	12	12	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					
		Input	Rupiah	351,910,000.00	351,910,000.00	100.00%
		Output	Bulan	12	12	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
01.09	Penyediaan jasa kebersihan kantor					
		Input	Rupiah	103,540,000.00	102,507,000.00	99.07%
		Output	Bulan	12	12	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
01.10	Penyediaan alat tulis kantor					
		Input	Rupiah	120,000,000.00	119,931,300.00	99.94%
		Output	Bulan	12	12	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					
		Input	Rupiah	194,000,000.00	193,637,000.00	99.81%
		Output	Bulan	12	12	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
01.13	Komodasi pemakaian dan pemeliharaan kantor					
		Input	Rupiah	301,000,000.00	298,171,200.00	99.22%
		Output	Unit	20	20	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
01.15	Penyediaan bahan bacaan dan langganan perundang-undangan					
		Input	Rupiah	18,000,000.00	17,200,000.00	95.55%
		Output	Bulan	12	12	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
01.17	Penyediaan makanan dan minuman					
		Input	Rupiah	5,300,000.00	5,270,000.00	99.43%
		Output	Bulan	12	12	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi lintas daerah					
		Input	Rupiah	317,500,000.00	313,497,670.00	98.80%
		Output	kali	36	36	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
01.19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tenaga perkantoran					
		Input	Rupiah	693,171,815.00	648,396,800.00	93.57%
		Output	Orang	37	37	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
01.20	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah					
		Input	Rupiah	380,598,000.00	380,426,000.00	99.96%
		Output	kali	36	36	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
02	**Program pembangunan sarana perkantoran Aparatur**			**250,540,000.00**	**237,661,154.00**	**94.87%**
02.16	Penyediaan gedung-gedung kantor	Input	Rupiah	52,500,000.00	52,500,000.00	100.00%
		Output	Gedung	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
02.22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor			50,000,000.00	49,875,000.00	99.75%
		Output	Gedung	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
02.24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Input	Rupiah	81,000,000.00	69,287,154.00	85.52%
		Output	Unit	8	8	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
02.32	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Input	Rupiah	66,000,000.00	65,999,300.00	100.00%
		Output	Unit	34	34	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			0.00	0.00	0.00
05.04	Kursus dan pelatihan keterampilan aparatur	Input	Rupiah	0.00	0.00	0.00%
		Output	Bulan	0.00	0.00	0.00%
		Outcome	Persen	0.00	0.00	0.00%
06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja**			**83,500,000.00**	**73,356,206.00**	**87.80%**
06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Input	Rupiah	83,500,000.00	73,356,206.00	87.80%
		Output	Laporan	5	5	100.00%
		Outcome	Persen	0.00	0.00	0.00%
17	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**			**7,678,574,985.00**	**6,708,245,018.00**	**87.36%**
17.03	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Input	Rupiah	113,186,870.00	109,740,870.00	96.41%
		Output	Perbup	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
17.06	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Input	Rupiah	1,176,360,000.00	1,081,740,943.00	91.96%
		Output	Perda	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
17.07	Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Input	Rupiah	1,286,537,999.00	1,157,028,098.00	89.92%
		Output	Perda	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
17.09	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi pelaporan akuntansi	Input	Rupiah	443,990,280.00	420,107,398.00	94.63%
		Output	Aplikasi	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
17.11	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi penatausahaan keuangan	Input	Rupiah	442,513,420.00	439,004,420.00	99.21%
		Output	Aplikasi	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
17.18	Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Input	Rupiah	377,884,900.00	367,443,412.00	97.23%
		Output	Laporan	3	3	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
17.27	Validasi data laporan keuangan daerah	Input	Rupiah	670,170,000.00	571,483,420.00	85.33%
		Output	Laporan	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
17.29	Koordinasi pengelolaan keuangan daerah	Input	Rupiah	850,271,353.00	824,819,422.00	97.02%
		Output	kali	12	12	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
17.75	Kolaborasi data pajak	Input	Rupiah	366,871,313.00	366,443,651.00	99.91%
		Output	Dokumen	12	12	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
17.90	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi PBB-P2	Input	Rupiah	267,250,000.00	260,930,455.00	97.64%
		Output	Aplikasi	2	2	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
17.91	Pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	Input	Rupiah	1,787,133,000.00	1,198,299,400.00	67.07%
		Output	Aplikasi	2	2	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%

No	URAIAN	Input/ Output/ Outcome	Satuan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
51	**Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah**			**1,123,050,907.00**	**1,008,246,607.00**	**87.86%**
52.01	Penyelenggaraan pelayanan penggajian	Input	Rupiah	142,599,108.00	142,572,108.00	99.99%
		Output	Bulan	12	12	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
52.02	Penyusunan surat pengelolaan dana (SPD), Anggaran kas dan SPTD	Input	Rupiah	341,600,000	341,573,000.00	99.99%
		Output	Bulan	12	12	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
52.04	Peningkatan pengelolaan perantausahaan keuangan daerah	Input	Rupiah	166,641,815.00	166,641,810.00	100.00%
		Output	Bulan	12	12	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
52.06	Rekonsiliasi dan sinkronisasi data keuangan	Input	Rupiah	472,228,000.00	348,379,800.00	73.99%
		Output	Kali	4	4	100.00%
		Outcome	Persen	80%	100%	111.11%
53	**Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah**			**0.00**	**0.00**	**0.00%**
53.03	Bimbingan teknis pengelolaan barang daerah	Input	Rupiah	0	0	0.00%
		Output	SKPD	46	0	0.00%
		Outcome	Persen	100%	0%	0.00%
56	**Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah**			**520,428,121.00**	**509,487,321.00**	**97.90%**
56.02	Penyusunan laporan keuangan semester I dan laporan realisasi anggaran triwulan	Input	Rupiah	165,840,000.00	158,890,300.00	95.81%
		Output	Laporan	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
56.03	Peningkatan laporan dan kinerja keuangan daerah	Input	Rupiah	354,598,221.00	350,597,021.00	98.87%
		Output	SKPD	45	45	100.00%
		Outcome	Persen	80%	80%	100.00%
57	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pemanfaatan Aset Daerah**			**1,687,995,720.00**	**1,597,345,405.00**	**94.63%**
57.02	Pengamanan daftar kebutuhan barang milik daerah	Input	Rupiah	113,908,720.00	99,509,520.00	87.36%
		Output	Laporan	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	46%	46%	100.00%
57.03	Penghapusan dan pemindahtangan barang milik daerah	Input	Rupiah	340,938,000.00	304,984,648.00	89.45%
		Output	Bulan	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	46%	46%	100.00%
57.04	Pengamanan dan memelihara barang milik daerah	Input	Rupiah	316,499,000.00	313,842,907.00	96.39%
		Output	Bulan	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	46%	50%	108.70%
57.05	Verifikasi dan rekonsiliasi data aset Kabupaten Natuna	Input	Rupiah	334,628,000.00	318,882,612.00	97.05%
		Output	Kali	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	46%	46%	100.00%
57.08	Appraisal aset barang daerah	Input	Rupiah	165,618,000.00	159,045,968.00	95.49%
		Output	Kegiatan	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	67%	67%	100.00%
57.09	Penyusunan laporan mutasi barang milik daerah	Input	Rupiah	206,406,000.00	201,080,740.00	97.42%
		Output	Laporan	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	90%	100%	111.11%
57.1	Inventarisasi barang milik daerah	Input	Rupiah	0.00	0.00	0.00%
		Output	Laporan	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	90%	100%	111.11%
1.05						
41	**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**			**33,088,850.00**	**33,088,850.00**	**100.00%**
41.06	Penyusunan standar satuan harga	Input	Rupiah	0.00	0.00	0.00%
		Output	Dokumen	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
41.07	Penyusunan analisis standar belanja	Input	Rupiah	33,088,850.00	33,088,850.00	100.00%
		Output	Dokumen	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
				24,183,196,590.00	**13,859,436,730.00**	**91.19%**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2020

Tabel 3.6
Laporan Pelaksanaan Program / Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Nama Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja		Realisasi		Capaian (%)		Permasalahan	Permasalahan / dan Tindak Lanjut
			Output/ Outcome	Anggaran	Output/ Outcome	Anggaran	Output/ Outcome	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi**	**12 Bulan**	**2,576,485,488**	**12**	**2,543,543,193**	**102.65**	**2,543,543,193**		
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	40,000,000	12	39,875,000	100	39,875,000		
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	93,900,000	12	85,776,023	100	85,776,023		
01.09.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	100,000,000	12	99,540,000	100	99,540,000		
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	120,000,000	12	119,998,000	100	119,998,000		
01.11.	Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggadaan	12 Bulan	185,000,000	12	184,995,000	100	184,995,000		
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Unit Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	40 Unit	228,100,000	35	210,721,900	87.5	210,721,900		
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	32,200,000	12	27,105,000	100	27,105,000		
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 Bulan	149,000,000	12	147,450,000	100	147,450,000		
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	34 kali	600,100,000	34	600,997,517	125	600,997,517		
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	37 Orang	743,047,488	37	743,011,752	100	743,011,752		
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi Dalam Daerah	18 kali	285,138,000	18	284,873,000	116.67	284,873,000		
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**65%**	**270,900,000**	**99%**	**268,322,605**	**100**	**268,322,605**		
02.15.	Penyediaan gedung/gudang kantor	Tersedianya gedung/gudang kantor	1 Gedung	52,500,000	1	52,500,000	100	52,500,000		
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	22 unit	133,000,000	22	130,491,605	100	130,491,605		
02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	30 Unit	85,400,000	30	85,331,000	100	85,331,000		
5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Aparatur yang Bersertifikasi**	**55%**	**75,000,000**	**99%**	**74,967,577**	**180**	**74,967,577**		
05.04.	Kursus dan peningkatan ketampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	15 Orang	75,000,000	15	74,967,577	100	74,967,577		
6	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Nilai Evaluasi AKIP**	**60 / 74,00**	**157,375,000**	**88 / 74,00**	**156,442,543**	**88 / 74,00**	**156,442,543**		
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	157,375,000	3	156,442,543	100	156,442,543		
17	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Opini Audit BPK**	**WTP**	**5,438,307,453**	**WTP**	**5,018,777,379**	**100**	**5,018,777,379**		
17.06.	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Jumlah Perda APBD	1 Perda	1,434,985,800	1	1,322,218,501	100	1,322,218,501		
17.07.	Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Jumlah perda APBDP	1 Perda	1,148,178,453	1	1,107,443,450	100	1,107,443,450		
17.10.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Komputerisasi Pelaporan Akuntansi Pemerintah	pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SAP	1 Aplikasi	208,105,000	1	184,290,255	100	184,290,255		
17.11.	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi penatausahaan keuangan daerah	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi komputerisasi penatausahaan keuangan	1 Aplikasi	298,310,000	1	282,283,594	100	282,283,594		
17.18.	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Pertanggungjawaban APBD dan Laporan keuangan daerah	3 Laporan	400,350,000	3	424,795,881	100	424,795,881		
17.27.	Validasi data laporan keuangan daerah	validasi data keuangan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi	1 kegiatan	1,493,679,000	1	1,430,361,147	100	1,430,361,147		
17.38.	Penyusunan pokok-pokok pengelolaan barang daerah	Jumlah pokok-pokok pengelolaan barang milik daerah	1 Jukris	83,120,000	1	77,560,997	100	77,560,997		
17.75.	Rekonsiliasi data pajak	Daftar Transaksi Harian (DTH)SKPD	12 Bulan	253,000,000	12	189,623,554	100	189,623,554		
33.03.	**Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**	**Jumlah objek pajak yang ditagih**	**548 Objek**	**1,440,859,800**	**329**	**1,341,879,003**	**100**	**1,341,879,003**		
33.02.	Pendataan objek pajak	Jumlah kecamatan yang dimutakhirkan data PBB-P2	2 Kec	87,344,000	2	77,294,000	100	77,294,000		

No	Nama Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja		Realisasi		Capaian (%)		Permasalahan	Permasalahan / dan Tindak Lanjut
			Output/ Outcom	Anggaran	Output/ Outcom	Anggaran	Output/ Outcom	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.03.	Penagihan wajib pajak	Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi retribusi	3 kali	72,882,000	3	65,182,184	100	65,182,184		
52.04.	Pemutakhiran data PBB	Jumlah kecamatan yang dianalisa nilai tanah	2 Kec	47,283,000	2	45,799,000	100	45,799,000		
52.06.	Rekonsiliasi retribusi	Jumlah rekonsiliasi data retribusi	1 aplikasi	47,960,000	1	45,876,800	100	45,876,800		
52.09.	Analisa zona nilai tanah	Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah	9 Kali	175,980,000	9	160,172,600	100	160,172,600		
52.12.	Intensifikasi dan Diversifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah	9 Kali	335,123,000	9	335,031,269	100	335,031,269		
52.13.	Penetapan Obejek Pajak PBB-P2 dan BPHTB	Penyampaian SPPT PBB dari desa / kelurahan	2000 SPPT	563,382,000	1,381	309,848,400	69.05	309,848,400		
52.14.	Penagihan Pajak PBB-P2	Jumlah objek PBB-P2	42,455 Objek	110,925,800	22,300	102,894,750	52.55	102,894,750		
53	**Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah**	**Tertib administrasi keuangan daerah**	**12 Bulan**	**2,356,835,000**		**2,354,206,265**	**100**	**2,354,206,265**		
53.01.	Penyelenggaraan pelayanan penggajian	Pelayanan penggajian Se-Kabupaten Natuna	12 Bulan	236,450,000	12	231,378,493	100	231,378,493		
53.02.	Penyusunan surat penediaan dana (SPD), anggaran kas dan SP2D	Penyediaan SPD, Anggaran kas dan SP2D	12 Bulan	112,790,000	12	111,992,000	100	111,992,000		
53.03.	Rekonsiliasi dan sinkronisasi data keuangan	Pelayanan penatausahaan keuangan daerah	4 Kali	785,635,000	4	780,991,772	100	780,991,772		
53.04.	Peningkatan pengelolaan penatausahaan keuangan daerah	Informasi keuangan daerah	1 Laporan	1,242,060,000	1	1,229,644,000	100	1,229,644,000		
56	**Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah**	**Opini Audit BPK**	**WTP**	**961,366,000**	**WTP**	**678,111,316**	**WTP**	**678,111,316**		
56.02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan	Laporan realisasi anggaran	1 laporan	367,850,000	1	277,091,147	100	277,091,147		
56.03.	Peningkatan Laporan dan Kinerja Keuangan Daerah	Jumlah aparatur yang memahami pengelolaan keuangan daerah	45 SKPD	513,556,000	45	401,020,069	100	401,020,069		
57	**Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah**	**Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah**	**42%**	**1,118,569,000**	**50%**	**1,007,030,205**	**1**	**1,007,030,205**		
57.02.	Penyusunan daftar kebutuhan barang milik daerah	Pelaksana pelaksanaan service	1 kali	100,060,000	1	99,030,300	100	99,030,000		
57.03.	Penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah	1 laporan	191,813,000	1	138,895,600	100	138,895,600		
57.04.	Pengamanan dan monitoring barang milik daerah	Jumlah aset yang dihapus/ dimutasi	1 Laporan	174,706,000	1	173,649,600	100	173,649,600		
57.05.	Verifikasi dan rekonsiliasi data aset	Jumlah monitoring BMD	1 Laporan	170,190,000	1	161,300,200	100	161,300,200		
57.08.	Appraisal aset/barang daerah	Jumlah rekonsiliasi data aset	1 Kali	362,390,000	1	321,218,105	100	321,218,105		
57.09.	Penyusunan laporan mutasi barang milik daerah	Dokumen pemanfaatan BMD penghapus PAD	1 dokumen	119,410,000	1	112,946,700	100	112,946,700		
	TOTAL			14,375,708,741		13,443,229,965		13,443,229,965		

Sumber : Data olahan

Tabel 3.7

Laporan Pelaksanaan Program / Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2019

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi**	**12 Bulan**	**3,014,606,040**	**12**	**3,787,928,740**	**100.00**	**92**		
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	45,000,000	12	45,000,000	100	100		
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan	12 Bulan	318,150,000	12	159,867,500	100	50		
01.03.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	12 Bulan	110,000,000	12	108,549,000	100	99		
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	150,000,000	12	149,916,000	100	100		
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggandaan	12 Bulan	267,300,000	12	267,363,500	100	100		
01.12	Penyediaan perlengkapan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan perlengkapan dan perlengkapan kantor	40 Unit	343,000,000	40	330,185,100	100	96		
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	65,000,000	12	39,156,000	100	60		
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 Bulan	125,000,000	12	115,640,000	100	92		
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	36 Kali	600,100,000	77	596,139,880	213.89	99		
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	37 Orang	733,806,040	37	687,928,160	100	94		
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	36 Kali	296,231,000	59	294,193,100	163.89	99		
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**70%**	**320,500,000**	**59.55%**	**328,836,900**	**85.07**	**99**		
02.16.	Penyediaan gedung/gudang kantor	Tersedianya gedung/ gudang kantor	1 Gedung	52,500,000	1	52,500,000	100	100		
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas Operasional yang dipelihara	8 Unit	192,800,000	9	181,506,900	112.5	99		
02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	30 Unit	85,200,000	30	84,830,000	93.75	100		
5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Pursentase Aparatur yang Bersertifikasi**	**65%**	**135,000,000**	**46.81%**	**92,468,540**	**72.03**	**68**		
05.04.	Kursus dan pemagangan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	13 Orang	135,000,000	13	92,468,540	86.67	68		
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan**	**Predikat / Nilai Akuntabilitas**	**BB/76,00**	**104,816,000**	**BB/76,8**	**94,871,117**	**101.12**	**91**		
04.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	104,816,000	2	94,871,117	66.67	91		
17	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan**	**Ketepatan Waktu Dalam Penetapan APBD**	**Tepat Waktu**	**2,717,750,000**	**Tepat Waktu**	**2,642,300,150**	**100**	**97**		
17.06.	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Jumlah Perda APBD	1 Perda	1,379,850,000	1	1,343,360,073	100	97		
17.07	Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Jumlah perda APBDP	1 Perda	1,337,900,000	1	1,298,940,077	100	97		
17	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan**	**Hasempurnakannya Fungsi Sarana dan Prasarana Aplikasi Keuangan Daerah**	**4 Aplikasi**	**3,075,002,000**	**4**	**1,946,905,929**	**100**	**94**		
17.10	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Komputerisasi Akuntansi	pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SAP	1 Aplikasi	519,630,000	1	484,457,257	100	93		
17.11	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi komputerisasi pengelolaahan keuangan	1 Aplikasi	689,472,000	1	636,701,739	100	91		
17.27	Integrasi data laporan keuangan daerah	integrasi data keuangan daerah dengan pemerintah pusat dan	1 Kegiatan	865,902,000	1	831,342,933	100	96		
17	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan**	**Opini Audit BPK**	**WTP**	**2,413,753,000**	**WTP**	**2,303,819,463**	**100**	**95**		
17.18	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Pertanggungjawaban APBD dan Laporan keuangan daerah	3 Laporan	572,450,000	3	516,278,732	100	90		
17.01	Pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	Sistem Aplikasi Keuangan	5 Aplikasi	1,841,303,000	5	1,687,540,741	100	92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	11
17	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Tertib Administrasi Pajak Daerah**	**12 Bulan**	**354,512,000**	**12**	**307,108,644**	**100**	**87**		
17.75.	Rekonsiliasi data pajak	Daftar Transaksi harian (DTH) SKPD	12 Bulan	354,512,000	12	307,108,644	100	87		
52	**Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah**	**Tertib administrasi keuangan daerah**	**12 Bulan**	**1,532,782,000**	**12**	**1,524,806,585**	**100**	**98**		
52.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Penggajian	Pelayanan penggajian Se-Kabupaten Natuna	12 Bulan	278,250,000	12	271,479,828	100	98		
52.03.	Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD), Anggaran Kas dan SPZD	Penyediaan SPD, Anggaran kas dan SPZD	12 Bulan	394,500,000	12	394,211,000	100	100		
52.06.	Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Keuangan	Jumlah rekonsiliasi dan sinkronisasi keuangan daerah	4 Kali	860,032,000	4	859,115,757	100	100		
53	**Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah**	**Persentase aparatur keuangan yang berkompetensi**	**85%**	**82,450,000**	**75.56**	**74,162,784**	**88.89**	**90**		
53.05.	Bentangan Teknis Pengelolaan Barang Daerah	Jumlah SKPD yang mengikuti bimtek pengelolaan barang daerah	48 SKPD	82,450,000	34	74,162,784	70.83	90		
56	**Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah**	**Opini Audit BPK**	**WTP**	**816,606,000**	**WTP**	**680,434,373**	**100**	**81**		
56.02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan	Laporan realisasi anggaran	1 laporan	331,863,000	5	220,880,246	500	69		
56.03.	Peningkatan Laporan dan Kinerja Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang memahami pengelolaan keuangan daerah	45 SKPD	494,746,000	45	439,554,127	100	89		
57	**Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah**	**Persentase Kebenaran Inventaris Aset Barang Milik Daerah**	**48%**	**2,221,419,000**	**44.46%**	**1,991,475,838**	**96.65**	**90**		
57.02.	Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah	1 Laporan	166,070,000	1	147,204,080	100	89		
57.03.	Penghapusan dan Pemindahtangannan Barang Milik Daerah	Jumlah aset yang dihapus/ dimutasi	1 Laporan	276,241,000	1	218,088,552	100	79		
57.04.	Pengamanan dan Monitoring Barang Milik Daerah	Jumlah monitoring BMD	1 Laporan	312,992,000	1	267,730,385	100	86		
57.05.	Verifikasi dan Rekonsiliasi Data Aset Kabupaten Natuna	Jumlah rekonsiliasi data aset	1 Kali	659,187,000	2	602,992,739	200	92		
57.06.	Penyusunan Daftar Kendaraan Milik Pemerintah Daerah	Jumlah laporan daftar kendaraan milik Pemda	1 Laporan	211,216,000	1	197,396,000	100	93		
57.08.	Appraisal Aset / Barang Daerah	Penilaian Aset Tanah Milik Daerah	1 Kegiatan	336,327,000	1	326,978,484	100	87		
57.09.	Penyusunan Laporan Mutasi Barang Milik Daerah	Laporan Mutasi Barang Milik Daerah	1 Laporan	265,287,000	1	231,085,580	100	87		
TOTAL				15,798,996,040		14,634,719,963		93		

Sumber : Data olahan

Tabel 3.8

Laporan Pelaksanaan Program / Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	[illegible]	[illegible]	12 Bulan	[illegible]	10	[illegible]	100	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	12 Bulan	[illegible]	12	[illegible]	100	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	12 Bulan	[illegible]	12	[illegible]	100	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	12 Bulan	[illegible]	12	[illegible]	100	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	12 Bulan	[illegible]	12	[illegible]	100	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	12 Bulan	[illegible]	12	[illegible]	100	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	20 Unit	[illegible]	20	[illegible]	100	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	12 Bulan	[illegible]	12	[illegible]	100	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	12 Bulan	[illegible]	12	[illegible]	100	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	12 Bulan	[illegible]	12	[illegible]	100	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	16 Kali	[illegible]	16	[illegible]	100	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	17 Orang	[illegible]	17	[illegible]	100	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	16 Kali	[illegible]	16	[illegible]	100	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Orang	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 Gedung	[illegible]	1	[illegible]	100	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 Gedung	[illegible]	1	[illegible]	100	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	8 Unit	[illegible]	8	[illegible]	100	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	24 Unit	[illegible]	24	[illegible]	100	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	12 Orang	[illegible]	12	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 Laporan	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dapat Waktu	[illegible]	Dapat Waktu	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 Perbup	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 Perda	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 Perda	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 Aplikasi	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 Aplikasi	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 Laporan	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	2 Aplikasi	[illegible]	2	[illegible]	[illegible]			

17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Audit BPK	WTP	[illegible]	WTP	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
17.18	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Pertanggungjawaban APBD dan Laporan keuangan daerah	2 Laporan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
17.19	Koordinasi pengelolaan keuangan daerah		12 Kali	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
17.02.	Pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	Sistem Aplikasi Keuangan	5 Aplikasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terdik Administrasi Pajak Daerah	12 Bulan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
17.75.	Administrasi dana pajak	Daftar Transaksi Antara; BPHTB/SPPT	12 Bulan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
32	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah	Terdik administrasi keuangan daerah	12 Bulan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
32.32.	Penyelenggaraan Pelayanan Penggajian	Pelayanan penggajian Bulan	12 Bulan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
32.02.	Penyusunan Anti Penyelesai Data (SPD), Anggaran Kas dan SPJ	Penyusunan SPD, Anggaran kas dan SPJ	12 Bulan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
32.04.	Pelaksanaan pengelolaan pendapatan keuangan daerah	Informasi keuangan daerah	12 Bulan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
32.06.	Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Keuangan	Jumlah rekonsiliasi dan sinkronisasi keuangan daerah	4 Kali	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
33	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah.	Persentase aparatur keuangan yang berkompetensi	65%	0	75.34	0	0.00	0		
33.01.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah	Jumlah SKPD yang mengikuti bimtek pengelolaan barang daerah	40 SKPD	0	0	0	0	0		
34	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah	Opini Audit BPK	WTP	[illegible]	WTP	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
34.02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan	Laporan realisasi anggaran	1 Laporan	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
34.03.	Penyiapan Laporan dan Kinerja Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang menyiapkan pengelolaan keuangan daerah	45 SKPD	[illegible]	45	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
37	Program Peningkatan dan Pengembangan Pemanfaatan Aset Daerah	Persentase Ketersediaan Informasi Aset Barang Milik Daerah	60%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
37.02.	Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik berat	1 Laporan	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
37.03.	Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah aset yang dikuasai dimiliki	1 Laporan	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
37.04	Pengurusan dan Monitoring Barang Milik Daerah	Jumlah monitoring BMD	1 Laporan	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
37.05.	Verifikasi dan Rekonsiliasi Data Aset Kabupaten Natuna	Jumlah rekonsiliasi data aset	1 Kali	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
37.06.	Inventaris Aset / Barang Daerah	Penilaian Aset Tetap Milik Daerah	1 Kegiatan	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
37.09	Penyusunan Laporan Mutasi Barang Milik Daerah	Laporan Mutasi Barang Milik Daerah	1 Laporan	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
37.10	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan Inventaris Barang Milik Daerah	1 Laporan	0	1	0	[illegible]	[illegible]		
40	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		65%	[illegible]	83%	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
41.00	Penyusunan standar sarana kerja	Laporan Standar Sarana Kerja	1 Dokumen	0	1	0	[illegible]	0		
41.07 .	Penyusunan analisis standar belanja	Laporan Analisis Standar Belanja	1 Dokumen	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Anggaran belanja yang dirasionalisasi untuk pencegahan belanja mendesak; belanja dan pemenuhan anggaran penanganan pandemi covid - 19	Dalam yang dilakukan dalam [illegible] penyusunan dengan [illegible] anggaran belanja [illegible], maka dilakukan [illegible] dengan [illegible] yang [illegible] untuk mencapai target kinerja dalam pelaksanaan Program Kegiatan dimaksud untuk [illegible] [illegible] dalam mewujudkan Standar Belanja Kerja sebagai Pedoman Pemerintah Daerah dalam mengusulkan Pagu Kerja anggaran.
TOTAL				14,302,306,590		12,859,426,739		91.19		

Sumber : Data olahan

B. Program/Kegiatan dan Target Kinerja Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan tahun 2021

Target kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya ditetapkan dengan DPA-SKPD. Berbicara mengenai target kinerja akan berhubungan dengan sistem pengendalian hasil. Apabila suatu target salah ditetapkan, atau target disusun dengan cara yang tidak benar dengan permasalahan nasional terkait pandemic covid 19 yang ikut mempengaruhi kebijakan daerah dalam penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), maka sistem pengendalian akan menghasilkan pekerjaan yang tidak optimal.

Penetapan target yang *achieveable* juga mesti memperhatikan prinsip *"stretching goals"* (atau menggantungkan target setinggi dan sejauh mungkin). Berbagai pengalaman di beragam organisasi menunjukkan, penetapan target yang sangat menantang *(very challenging goals)* memberikan dapak positif bagi peningkatan kinerja pegawai secara dramatis. Sasaran kinerja yang ditetapkan bersifat relevan dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang diemban oleh pegawai. Prinsip ini meminta kita untuk menyusun sasaran-sasaran kinerja yang fokus dan relevan dengan tugas utama pekerjaan, atau tujuan utama unit kerja dimana kita berada. Dengan demikian, sasaran yang ditetapkan juga menjadi lebih tajam dan bersifat kritikal bagi peningkatan kinerja bisnis secara keseluruhan.

Untuk lebih jelasnya target program dan kegiatan pada tahun 2021, seperti yang ditampilkan dibawah ini:

Tabel 3.9

Laporan Pelaksanaan Program / Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Nama Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja		Keterangan
			Output/Outcome	Anggaran	
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi**	**12 Bulan**	**2,724,917,015.00**	
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	23,000,000.00	
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	531,910,000.00	
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	102,540,000.00	
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	120,000,000.00	
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggandaan	12 Bulan	194,000,000.00	
01.13.	Penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Unit Penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor	20 Unit	361,000,000.00	
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	30,000,000.00	
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 Bulan	5,398,000.00	
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	36 kali	317,300,000.00	
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	37 Orang	653,171,015.00	
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	36 Kali	386,598,000.00	
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**65%**	**250,500,000.00**	
02.16.	Penyediaan gedung/gudang kantor	Tersediasya gedung/gudang kantor	1 Gedung	52,500,000.00	
02.22.	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Gedung	50,000,000.00	
02.24.	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	8 unit	82,000,000.00	
02.26.	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	34 Unit	66,000,000.00	
5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Aparatur yang Bersertifikasi**		**0.00**	
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	15 Orang	0.00	
6	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Nilai Evaluasi AKIP**	**BB / 75,00**	**83,549,000.00**	
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	83,549,000.00	
17	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Opini Audit BPK**	**WTP**	**7,678,574,985.00**	
17.03.	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah Perbup tentang juknis kebijakan akuntansi	1 Perbup	110,386,820.00	
17.06.	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Jumlah Perda APBD	1 Perda	1,176,360,000.00	
17.07.	Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Jumlah perda APBDP	1 Perda	1,286,537,999.00	
17.10.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Komputerisasi Pelaporan Akuntansi Pemeristah	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SAP	1 Aplikasi	442,990,780.00	
17.11.	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi penatausahaan keuangan daerah	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi komputerisasi penatausahaan keuangan	1 Aplikasi	442,515,420.00	

No	Nama Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja		Keterangan
			Output/Outcome	Anggaran	
17.18.	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Pertanggungjawaban APBD dan Laporan keuangan daerah	3 Laporan	377,884,900.00	
17.27.	Validasi data laporan keuangan daerah	Validasi data keuangan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi	1 Kegiatan	670,170,000.00	
17.29.	Koordinasi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah koordinasi keuangan daerah	12 Kali	850,271,053.00	
17.75.	Rekonsiliasi data pajak	Daftar Transaksi harian (DTH)SKPD	12 Bulan	266,675,013.00	
17.90.	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi BMD	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi BMD	2 Aplikasi	267,250,000.00	
17.92.	Pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	Laporan SIKD	5 Aplikasi	1,787,533,000.00	
41.	**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**	**Persentase perangkat daerah yang melaksanakan SPM**	**82%**	**33,088,850.00**	
41.06.	Penyusunan Standar Satuan Harga	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan SPM	1 Dokumen	0.00	
41.07.	Penyusunan Analisis Standar Belanja	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan SPM	1 Dokumen	33,088,850.00	
52.	**Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah**	**Tertib administrasi keuangan daerah**	**12 Bulan**	**1,123,058,807.00**	
52.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Penggajian	Pelayanan penggajian Se-Kabupaten Natuna	12 Bulan	142,589,188.00	
52.02.	Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD), Anggaran Kas dan SP2D	Penyediaan SPD, Anggaran kas dan SP2D	12 Bulan	341,600,000.00	
52.04.	Peningkatan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Informasi keuangan daerah	12 Bulan	166,641,619.00	
52.06.	Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Keuangan	Pelayanan penatausahaan keuangan daerah	4 Kali	472,228,000.00	
53.	**Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah**	**Persentase peserta yang bersertifikat**	**85%**	**0.00**	
53.03.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah	Jumlah Peserta	48 SKPD	0.00	
56.	**Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah**	**Opini Audit BPK**	**WTP**	**520,428,221.00**	
56.02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan	Laporan realisasi anggaran	1 Laporan	165,840,000.00	
56.03.	Peningkatan Laporan dan Kinerja Keuangan Daerah	Jumlah aparatur yang memahami pengelolaan keuangan daerah	45 SKPD	354,588,221.00	
57.	**Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah**	**Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah**	**80%**	**1,687,989,720.00**	
57.02.	Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah	1 Laporan	113,900,720.00	
57.03.	Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Jumlah aset yang dihapus/ dimutasi	1 Laporan	340,938,000.00	
57.04.	Pengamanan dan Monitoring Barang Milik Daerah	Jumlah monitoring BMD	1 Laporan	346,499,000.00	
57.05.	Verifikasi dan Rekonsiliasi Data Aset Kabupaten Natuna	Jumlah rekonsiliasi data aset	1 Kali	534,628,000.00	
57.08.	Appraisal Aset / Barang Daerah	Penilaian aset tanah milik daerah	1 Kegiatan	145,618,000.00	
57.09.	Penyusunan Laporan Mutasi Barang Milik Daerah	Laporan mutasi barang milik daerah	1 Laporan	206,406,000.00	
57.10.	Inventarisasi barang milik daerah	Jumlah laporan BMD	1 Laporan	0.00	
	Total			**14,102,106,508.00**	

Sumber : Data Olahan

C. Hasil Capaian Program RPJMD 2016 - 2021 melalui pelaksanaan RKPD Tahun 2018, 2019 dan 2020

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah (lima tahunan) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan. Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 yang disusun dengan penyesuaian-penyesuaian terkini sesuai dengan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang-undangan, tugas dan fungsi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Berikut disajikan Hasil Capaian Program RPJMD 2016 - 2021 melalui pelaksanaan RKPD Tahun 2018, 2019 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 4.0
Hasil Capaian Program RPJMD 2016 - 2021
Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2018, 2019 & 2020

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target RPJMD Kabupaten pada RKPD Kabupaten Tahun ke-										Capaian Target (Realisasi) RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun ke-						Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun ke-						Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)	
							2017		2018		2019		2020		2021		2018		2019		2020		2018		2019		2020					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12 Bulan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
																					[illegible]											
																					[illegible]											

[illegible]

Sumber : Data Olahan

D. Hasil Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2018, 2019 dan 2020

Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran/Program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pendukung Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2016 - 2021 yang tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2020.

Tabel 4.1

Capaian Indikator Pembangunan Daerah RPJMD 2016 - 2021

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00		
3.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	60	75	65	65	70	70	75	65	100	70	65	100	70	91.67		
3.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	%	85	55	85	90	90	85	85	85		85	85		90	66.67		
3.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	50	75	55	60	65	65	75	60	100	65	60	100	65	105.00		
3.02.06.	Program Peningkatan Pengendalian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	B / 65,55	A / 80,00	BB / 74,00	BB / 76,00	BB / 76,00	BB / 76,00	A / 80,00	BB	80.00	BB / 78,00	BB	80.00	BB / 78,00	92.34		
3.02.11.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Aplikasi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100.00		
		%	100	100	100	100	100	100	100	75	75	100	75	75	100	75.00		
		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00		
3.02.12.	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	10	870	16	17				129			129			77.28		
		%	141	18	100	109				10			10			100.00		
		%	4.40	3.65	4.60	4.80				29.64			29.64			551.43		
		%	12	70	10	12				10			10			100.00		
3.02.13.	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah	Dokumen	12	60	12	12	12	12	12	12	100	12	12	100	12	100.00		
3.02.53.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	%	100	100	80	100	100	100	100	80	100	100	80	100	100	100.00		
3.02.54.	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah	%	60	100	100	80	82	84	86	100	100	81	100	100	80	100.00		
		%	40	36	30	44	46	48	50	80	80	40	80	80	40	100.00		
3.02.57.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	%	40	50	42	44	46	48	50	42	50	48	42	50	48	100.00		
		%	40	50	42	42	46	48	50	42	50	48	42	50	48	100.00		

Sumber : Data Olahan

E. Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Antara Pemerintah Baik Pusat, Provinsi, Kabupaten dengan Kabupaten Lainnya

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk perjanjian kerjasama, sebagai berikut:

1. Kerjasama dengan Bank Riau Kepri Cabang Ranai.

   Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19 menyatakan Kepala Daerah menunjuk Bank Umum dalam mengelola uang daerah untuk menyimpan penerimaan dan pengeluaran. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, melakukan Perikatan Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan PT. Bank Riau Kepri Cabang Ranai Tentang: **"Pemanfaatan Fasilitas Perbankan dalam Rangka Pengelolaan Dana Kas yng Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna"** Nomor: 006/Mou/2018 dan Nomor :007/RNI/2018, ditetapkan di Ranai pada tanggal, 09 Agustus 2018.

2. Kerjasama dengan Bank Mandiiri Kantor Cabang Natuna.

   Atas Nama Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, melakukan Perikatan Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan PT. Mandiri (Persero) KCP. Natuna Tentang: **"Pengelolaan Dana Kas Pemerintah Kabupaten Natuna"** Nomor: 08/Mou/BPKAD/IX/2014 dan Nomor :1.SP.NTN/470/2014, ditetapkan di Ranai pada tanggal, 16 September 2014.

3. Kerjasama dengan BPJS dalam Pelayanan Kesehatan PNS.

   Atas Nama Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), melakukan Perikatan Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenaga Kerjaan Kantor Cabang Tanjungpinang Tentang: **"Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Bagi Pegawai PTT, GTT dan PTT Paramedis Pemerintah Kabupaten Natuna"** Nomor: 180/HK-PK/1/2020 dan Nomor : PKS/01/012020, ditetapkan di Ranai pada tanggal, 02 Januari 2020.

F. Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah

Reformasi birokrasi publik pada pemerintah daerah dilaksanakan tidak hanya mencakup pembenahan untuk menuju perampingan ukuran dan komponen birokrasi. Lebih dari itu, reformasi birokrasi publik juga mencakup perubahan secara *gradual* terhadap nilai *(public value)* dan budaya aparat pemerintah daerah yang berimplikasi pada etos kerja, kualitas pelayanan publik, hingga perubahan perilaku sebagai penguasa menjadi pelayanan dan pengayoman masyarakat.

Perubahan struktural seharusnya diikuti oleh perubahan kultural, berupa internalisasi *mindset* dan perilaku, serta revitalisasi etos kerja. Beranjak dari keinginan untuk melepaskan diri dari budaya birokratis yang kaku dan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas Pemerintah Daerah di pacu untuk membuat inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Peraturan Bupati Natuna Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Sistem Informasi Keuangan Daerah sekaligus menjawab amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pasal 11 dimana penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah diserahkan ke Pemerintah Daerah masing-masing.

Penyelenggaraan inovasi Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya dikenal dengan *Integrated Natuna Financial Information System* (Sistem Informasi Keuangan Natuna Terintegrasi) yang selanjutnya disingkat iNFIS adalah suatu sistem aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna untuk pengelolaan keuangan daerah secara mandiri. iNFIS terdiri dari beberapa modul dasar, yaitu Modul Perencanaan, Penganggaran, Perbendaharaan, BMD, Tepra, Monitoring, serta Pelaporan. Kedepannya akan dikembangkan juga modul-modul lain, seperti modul Kepegawaian, Absensi, Penggajian, Perjalanan Dinas dan setiap tahun selalu menambah modul serta menyesuaikan dengan perubahan regulasi. Hal ini dilakukan agar Kabupaten Natuna dapat bersaing dengan Pemerintah Daerah lainya serta yang paling penting adalah meningkatkan pelayanan publik dengan prinsif efisiensi dan efektifitas.

BAB V

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN RUTINITAS PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN TUPOKSI

Realisasi dan capaian kinerja yang dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2020, sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan program kegiatan yang dilaksanakan pada masing-masing bidang di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan refleksi dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah, sehubungan dengan hal tersebut secara ringkas akan dijelaskan sesuai dengan bidang yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

1. Sekretariat

Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki tugas yaitu menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan serta mengkoordinasikan tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang dalam hal ini melaksanakan 11 (sebelas) program dan 46 (empat puluh enam) kegiatan, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dialokasikan sebesar Rp2,724,917,015,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp2,700,080,126,00 atau mencapai 99,09 % merupakan akumulasi dari 11 (sebelas) kegiatan. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur realisasi sebesar Rp237,661,214.00 atau sebesar 94.87% dari total anggaran yaitu sebesar Rp250.500.000,00 dalam 4 (empat) kegiatan. Untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdapat 1 (satu) kegiatan dengan alokasi sebesar Rp 0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau realisasi sebesar 00,00%. Sedangkan untuk Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan alaokasi sebesar Rp83,549,000,00 dengan realisasi Rp73,356,206,00 atau sebesar 87,80%. Berikut disajikan realisasi program dan kegiatan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat Tahun 2020

No	URAIAN	Input/ Output/ Outcome	Satuan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
01.	**Program pelayanan Administrasi Perkantoran**			**2,724,917,015.00**	**2,498,358,103.00**	**91.69%**
01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Input	Rupiah	23,000,000.00	22,990,000.00	99.96%
		Output	Bulan	12	12	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input	Rupiah	531,910,000.00	469,910,000.00	88.34%
		Output	Bulan	12	12	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input	Rupiah	102,540,000.00	96,512,000.00	94.12%
		Output	Bulan	12	12	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Input	Rupiah	120,000,000.00	119,931,500.00	99.94%
		Output	Bulan	12	12	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input	Rupiah	194,000,000.00	183,675,000.00	94.68%
		Output	Bulan	12	12	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
01.13	Penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor	Input	Rupiah	361,000,000.00	358,175,200.00	99.22%
		Output	Unit	20	20	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input	Rupiah	30,000,000.00	15,400,000.00	51.33%
		Output	Bulan	12	12	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Input	Rupiah	5,308,000.00	5,370,000.00	99.48%
		Output	Bulan	12	12	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
01.18	Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Input	Rupiah	317,300,000.00	272,426,355.00	85.86%
		Output	kali	36	36	100.00%
		Outcome	Person	100%	100%	100.00%
01.19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran	Input	Rupiah	653,171,015.00	648,396,848.00	99.27%
		Output	Orang	37	37	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
01.20	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Input	Rupiah	386,598,000.00	305,571,200.00	79.04%
		Output	kali	36	36	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
02	**Program peningkatan sarana prasarana Aparatur**			**250,500,000.00**	**223,576,214.00**	**89.25%**
02.16	Penyediaan gedung gudang kantor	Input	Rupiah	52,500,000.00	52,500,000.00	100.00%
		Output	Gedung	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
02.22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor			50,000,000.00	49,875,000.00	99.75%
		Output	Gedung	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%

No	URAIAN	Input/ Output/ Outcom	Satuan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
02.24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Input	Rupiah	82,000,000.00	69,287,714.00	84.50%
		Output	Unit	8	8	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
02.26	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Input	Rupiah	66,000,000.00	65,998,500.00	100.00%
		Output	Unit	34	34	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			0.00	0.00	0.00
05.04	Kursus dan peningkatan keterampilan aparatur	Input	Rupiah	0.00	0.00	0.00%
		Output	Bulan	0.00	0.00	0.00%
		Outcome	Persen	0.00	0.00	0.00%
06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan**			**83,549,000.00**	**73,356,206.00**	**87.80%**
06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Input	Rupiah	83,549,000.00	73,356,206.00	87.80%
		Output	Laporan	3	3	100.00%
		Outcome	Persen	0.00	0.00	0.00%
				3,058,966,015.00	3,011,097,546.00	98.44%

Sumber : Data LRA TA. 2020

2. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran memiliki tugas yaitu merumuskan prosedur penyusunan rancangan Perubahan APBD, pengendalian penyusunan anggaran, dan mengkoordinasikan perumusan program dan kebijakan teknis penyusunan anggaran dan belanja, pelaporan BLUD, JKN, Penyertaan Modal, Dana Bergulir, investasi jangka pendek, tunjangan profesi guru PNSD, Tambahan Penghasilan guru PNSD dan Piutang yang dalam hal ini melaksanakan 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan dengan rincian realisasi 2 (dua) program yaitu sebesar Rp4,369,025,240,00 atau sebesar 81,02% dari total anggaran yaitu sebesar Rp5,392,828,999,00 dengan rincian Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah realisasi sebesar Rp4,019,645,440,00 atau sebesar 81,69% dari total anggaran yaitu sebesar Rp4,920,600,999,00. Sedangkan untuk Program Pelayanan

Administrasi Keuangan Daerah dialokasikan sebesar Rp472,228,000,00 dengan realisasi sebesar 73,99% atau Rp 349,379,800,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Laporan Realisasi Anggaran Bidang Anggaran Tahun 2020

No	URAIAN	Input/ Output/ Outcom	Satuan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
17	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**			**4,920,600,999.00**	**4,019,645,440.00**	**81.69%**
17.06	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Input	Rupiah	1,176,360,000.00	1,081,741,942.00	91.96%
		Output	Perda	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
17.07	Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Input	Rupiah	1,286,537,999.00	1,157,620,098.00	89.98%
		Output	Perda	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
17.27	Validasi data laporan keuangan daerah	Input	Rupiah	670,170,000.00	571,983,920.00	85.35%
		Output	Kegiatan	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
17.92	Pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	Input	Rupiah	1,787,533,000.00	1,208,299,480.00	67.60%
		Output	Aplikasi	2	2	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
52	**Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah**			**472,228,000.00**	**349,379,800.00**	**73.99%**
52.06	Rekonsiliasi dan sinkronisasi data keuangan	Input	Rupiah	472,228,000.00	349,379,800.00	73.99%
		Output	Kali	4	4	100.00%
		Outcome	Persen	90%	100%	111.11%
				5,392,828,999.00	**4,369,025,240.00**	**81.02%**

Sumber : Data LRA TA. 2020

3. Bidang Akuntasi Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi Keuangan Daerah memiliki tugas melakukan penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perbendaharaan, penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang dalam hal ini melaksanakan 3 (tiga) program dan 8 (delapan) kegiatan. Total realisasi sebesar Rp2,486,631,384,00 atau sebesar 98,10% dari pagu anggaran sebesar Rp2,534,683,522,00. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dialokasikan sebesar Rp 1,530,066,113,00 dengan realisasi sebesar Rp1,492,998,875,00 atau sebesar 88.83% yang tersebar pada 4 (empat) kegiatan. Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah terdapat 2 (dua) kegiatan dengan realisasi

Rp484,145,188,00 atau 99,99% dari pagu alokasi sebesar Rp484,189,188,00. Untuk Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah alokasi anggaran sebesar Rp520,428,221,00 dengan realisasi Rp509,487,321,00 atau sebesar 97,90% dari 2 (dua) kegiatan. Berikut disajikan realisasi program dan kegiatan sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4
Laporan Realisasi Anggaran
Bidang Akutansi Keuangan Daerah Tahun 2020

No	URAIAN	Input/ Output/ Outcome	Satuan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
17	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**			**1,530,066,113.00**	**1,492,998,875.00**	**97.58%**
17.10	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi pelaporan akuntansi pemerintah	Input	Rupiah	442,990,780.00	420,107,390.00	94.83%
		Output	Aplikasi	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
17.11	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi penatausahaan keuangan daerah	Input	Rupiah	442,515,420.00	439,004,420.00	99.21%
		Output	Aplikasi	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
17.18	Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Input	Rupiah	377,884,900.00	367,443,412.00	97.24%
		Output	Laporan	3	3	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
17.75	Rekonsiliasi data pajak	Input	Rupiah	266,675,013.00	266,443,653.00	99.91%
		Output	Bulan	12	12	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
52	**Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah**			**484,189,188.00**	**484,145,188.00**	**99.99%**
52.01	Penyelenggaraan pelayanan penggajian	Input	Rupiah	142,589,188.00	142,572,188.00	99.99%
		Output	Bulan	12	12	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
52.02	Penyusunan surat penyediaan dana (SPD), Anggaran kas dan SP2D	Input	Rupiah	341,600,000	341,573,000.00	99.99%
		Output	Bulan	12	12	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
56	**Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah**			**520,428,221.00**	**509,487,321.00**	**97.90%**
56.02	Penyusunan laporan keuangan semester I dan laporan realisasi anggaran triwulan	Input	Rupiah	165,840,000.00	158,890,300.00	95.81%
		Output	Laporan	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	100%	100%	100.00%
56.03	Peningkatan laporandan kinerja keuangan daerah	Input	Rupiah	354,588,221.00	350,597,021.00	98.87%
		Output	SKPD	45	45	100.00%
		Outcome	Persen	80%	80%	100.00%
				2,534,683,522.00	**2,486,631,384.00**	**98.10%**

Sumber : Data LRA TA. 2020

4. Bidang Aset

Bidang Aset memiliki tugas melakukan penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan barang milik daerah yang dalam hal ini melaksanakan kegiatan dengan total realisasi sebesar Rp1,597,345,405,00 atau sebesar 94,63% dari total alokasi sebesar Rp1,687,989,720,00. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah dialokasikan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,0%. Sedangkan Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah dengan realisasi sebesar Rp1,597,345,405,00 atau 94,63% dari total pagu sebesar Rp1,687,989,720,00. Berikut disajikan laporan realisasi bidang aset sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.5
Laporan Realisasi Anggaran
Bidang Aset TA. 2020

No	URAIAN	Input/ Output/ Outcome	Satuan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
53	**Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah**			**0.00**	**0.00**	**0.00%**
53.03	Bimbingan teknis pengelolaan barang daerah	Input	Rupiah	0	0	0.00%
		Output	SKPD	46	0	0.00%
		Outcome	Persen	100%	0%	0.00%
57	**Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah**			**1,687,989,720.00**	**1,597,345,405.00**	**94.63%**
57.02	Penyusunan daftar kebutuhan barang milik daerah	Input	Rupiah	113,900,720.00	99,508,520.00	87.36%
		Output	Laporan	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	46%	46%	100.00%
57.03	Penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah	Input	Rupiah	340,938,000.00	304,984,648.00	89.45%
		Output	Bulan	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	46%	46%	100.00%
57.04	Pengamanan dan monitoring barang milik daerah	Input	Rupiah	346,499,000.00	333,842,907.00	96.35%
		Output	Bulan	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	46%	50%	108.70%
57.05	Verifikasi dan rekonsiliasi data aset Kabupaten Natuna	Input	Rupiah	534,628,000.00	518,882,622.00	97.05%
		Output	Kali	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	46%	46%	100.00%
57.08	Appraisal aset/ barang daerah	Input	Rupiah	145,618,000.00	139,045,968.00	95.49%
		Output	Kegiatan	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	65%	65%	100.00%

57.09	Penyusunan laporan mutasi barang milik daerah	Input	Rupiah	206,406,000.00	201,080,740.00	97.42%
		Output	Laporan	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	90%	100%	111.11%
57.10	Inventarisasi barang milik daerah	Input	Rupiah	0.00	0.00	0.00%
		Output	Laporan	1	1	100.00%
		Outcome	Persen	90%	100%	111.11%
				1,687,989,720.00	1,597,345,405.00	94.63%

Sumber : Data LRA TA. 2020

BAB VI
PENUTUP

A Kesimpulan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna merupakan pendukung atas keberhasilan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2016 - 2021, Terhadap misi yang diemban oleh **Kepala daerah Kabupaten Natuna 2016 - 2021 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menjadi pelaksana dan penunjang dari segi pengelolaan keuangan dimana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah akan memberikan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, SKPD dan masyarakat luas yang terkait dengan pelaksanaan misi tersebut, dari segi pengelolaan keuangan.**

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah menetapkan Program prioritas sebagai pendukung Visi dan Misi RPJMD 2016 - 2021 Kabupaten Natuna adalah ***"Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan"*** dengan Indikator Program *(Outcame)* ***"Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku",*** untuk lebih jelas mengenai program prioritas sebagai pendukung visi dan misi RPJMD 2016 - 2021 Kabupaten Natuna. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam menetapkan rencana kinerja serta untuk mewujudkan visi, dan misi yang telah ditetapkan meliputi 3 (tiga) sasaran strategis yang tercermin dari 4 (empat) indikator sasaran yang dilaksanakan dalam beberapa program dan kegiatan.

Secara umum 2 (dua) Sasaran strategis yang tercakup dalam 5 (lima) program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2019 dapat dicapai sepenuhnya atau lebih dari 100% dari target yang telah ditetapkan hal ini menunjukan adanya komitmen penuh dari pimpinan beserta dukungan pegawai/staf dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2020.

B. Rekomendasi

Berdasarkan dari hasil evaluasi diatas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merekomendasikan program kegiatan untuk Rencana Kerja 2021 sebagai berikut:

1. Merekomendasi untuk melanjutkan program kegiatan yang terkait dengan peningkatan capaian kinerja pada tahun 2021, untuk peningkatan sumber daya manusia ASN di lingkunggan Pemerintah Kabupaten Natuna terhadap pemahaman laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
2. Merekomendasi untuk melanjutkan program kegiatan yang terkait dengan peningkatan sumber daya manusia untuk tata kelola aset.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam peningkatan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
4. Merekomendasi untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, guna mendukung transparasi dan akuntabelitas pengelolaan keuangan daerah.